



**KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:
HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH
B4A 0007121

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI
PERSEROAN TERBATAS**

Disusun oleh:

HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH
B4A 0007121

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 Maret 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. **Prof Dr Paulus Hadisuprpto, SH., MH**
NIP. 130 368 053 NIP.130 531 702

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul:

“ Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, waktu, dan literatur. Namun dengan kebulatan tekad serta dukungan dari Pembimbing, dan rekan sejawat/seangkatan, Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terimakasih yang tak terhingga kepada Pembimbing, Bunda Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., yang telah meluangkan waktu memberikan dorongan, pengarahan, bimbingan, masukan-masukan yang konstruktif, baik semasa kuliah maupun selama proses penulisan Tesis ini. Penulis mendapatkan kesan yang mendalam, bahwa beliau adalah seorang Guru Besar yang sangat cerdas dan profesional dalam membimbing “anak didik” nya tanpa pilih kasih.

Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada semua pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penulisan Tesis ini, diantaranya:

1. Pimpinan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan toleransi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, yang secara

bijak telah menularkan pengetahuan selama penulis mengikuti studi.

3. Bapak/Ibu Pimpinan Peseroan Terbatas yang akta perseroannya dijadikan bahan penelitian.
4. Rekan-rekan seangkatan yang selalu mendukung dan mendorong serta menjadi mitra diskusi yang setia dalam mengikuti kuliah.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian, mulai dari awal sampai terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada yang tercinta Ibunda dan Ibu Mertua tercinta, serta seluruh kakanda dan adinda, baik yang ada di Pontianak maupun yang ada di Yogyakarta, atas dukungan doa serta nasehat dan pengertian yang diberikan selama penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya, terima kasih yang paling mendalam penulis sampaikan kepada suami tercinta, Ir. Y. Budhi Dharmawan, juga anak-anakku tersayang, Laurensia Andrini (Ririn) dan Rionaldi Chandraseta (Rio) yang telah memberikan dorongan serta merelakan waktu berkumpul dalam keluarga demi terselesaikannya studi, dan turut membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semarang, Pebruari 2008

Hiasinta Yanti Susanti Tan.

KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia yang berusaha menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas, jika anggaran dasarnya tidak disesuaikan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisa masalah hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Titik tolak dari analisis adalah pembaharuan anggaran dasar Perseroan melalui akta-akta Risalah Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh seorang Notaris. Adapun materi yang akan dibahas mencakup sejarah perseroan di Indonesia, kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum, organ-organ badan hukum, konsekuensi perubahan Undang-Undang perseroan terbatas yang telah beberapa kali diubah terhadap eksistensi perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan dimuka dan dari hasil analisis penelitian dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perubahan UUPT, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya
2. Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap.
3. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus menyesuaikan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah.
4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya. Dan apabila penerapan UUPT tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diharapkan pelayanan terhadap para pelaku usaha di Indonesia dalam dunia investasi menjadi lebih cepat.

Kata kunci adalah Perubahan UUPT, dan eksistensi Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

THE CONSEQUENCES CHANGE OF LAWS TO THE LIMITED COMPANY EXISTENCE

The Development of Legal System in Indonesia is trying to adjust to the progress of science and technology in the era of globalization, so the Law on the Limited Company has been changed several times.

This study aims to analyze the consequences and deep changes in the Law of the existence of the Limited Company in Indonesia, and the conditions and permission should be fulfilled by a Limited Company to be approved to operate in Indonesia. So, how is the status of property or assets of a Limited Company, if the regulations does not essentially adjusted?

Research is using the method of normative juridical approach, with review and analyze legal issues in accordance with the needs of the research. Point of departure from the analysis is the renewal of the regulations through the Company-act or statement Meetings Decisions made by a Notary Public. The materials that will be discussed include the history of company in Indonesia, the limited partnership as a Law Board, the body organs of law, consequences of changes in Limited Company laws that have been changed several times to the Limited Company existence.

Based on the description in the background, the problem formulation and research purposes, as had been presented and the analysis of the results of research can be conclusions and suggestions as follows:

1. UUPT changes, giving the burden to the business in Indonesia must adjust the regulations in the time 1 (one) year from the announcement.
2. By the introduction of UUPT, the conditions or license necessary for a Limited Company can operate in Indonesia are made easier and more simple, and to the direction of one stop service.
3. Limited Company which has a property / land assets should be basically accommodate its regulations in order to maintain the existence of the Company as Law Board that has the right to own land.
4. Need of socialization, the more incentive about the birth or the announcement of Law Number 40 Year 2007 about the Limited Company, so that all of the business or businessman can find out. And when the implementation of UUPT can be properly implemented, it is expected that the service to the businessman in Indonesia in the investment world becomes more rapid

Keyword: the Change of UUPT, and the Limited Company existence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis data	27
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	29
A.. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	29
1. Pengertian Perseroan Terbatas	29
2. Status Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas	36
3. Tata Cara Mendirikan Perseroan Terbatas	41
3.1. Didirikan Minimal Dua “Orang”	41

3.2. Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	42
3.3. Tempat Kedudukan dan Alamat Tetap	43
3.4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas	44
3.5. Pengesahan oleh Menteri	45
3.6. Daftar Perseroan Dan Pengumuman	46
 B. PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS	47
1. Peraturan Berdasarkan Periode Berlakunya	47
1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	47
1.2. UU Nomor 1 Tahun 1995	48
1.3. UU Nomor 40 Tahun 2007	49
2. Sistematika UU nomor 40 Tahun 2007	53
 C. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN KONSEKUENSINYA	54
C.1. Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha	54
C.2. Perubahan Prosedure Pendirian Perseroan Terbatas	66
C.3. Terhadap Konsekuensi Harta Kekayaan/Asset Perseroan Terbatas	67
 BAB III. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	71
A. HASIL PENELITIAN	71
1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas	71
1.1. Konsekuensi Yuridis	94
1.2. Konsekuensi Non Yuridis	102
2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas	105

3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya...	110
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	119
B.1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas	119
B.2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas	128
B.3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya	131
BAB IV. PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B.Saran-saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistematika UUPT Nomor 40 Tahun 2007	53
Tabel 2	Perbedaan Anggaran Dasar PT. Utama Jaya Mekar	95
Tabel 3	Perbedaan Anggaran Dasar PT. Surya Sido Agung Mulya	97
Tabel 4	Perbedaan Anggaran Dasar PT. Rojotumoto Kencono	100
Tabel 5	Perbedaan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan UUPT Nomor 1 Tahun 1995	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enam puluh tiga tahun sudah Indonesia merdeka. Suatu rentang waktu yang tidak bisa dikatakan pendek untuk suatu siklus kehidupan seseorang, tetapi bukan juga usia yang panjang untuk perjalanan suatu bangsa. Komitmen kebangsaan yang dibangun oleh *founding father* tidak hanya berkait pada ranah ekonomi, politik, dan sosial budaya, tetapi juga pada ranah hukum. Namun dibandingkan dengan bidang-bidang lain, hukum masih jauh ketinggalan dan menghadapi persoalan yang serius. *Distrust* terhadap lembaga peradilan merupakan persoalan mendasar. Kalau *trust* merupakan bentuk modal sosial (*social capital*), maka *distrust* merupakan ‘virus’ bagi pengembangan kehidupan hukum itu sendiri. Dari sekian banyak persoalan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, komodifikasi proses peradilan merupakan aspek yang sangat krusial.

Secara konseptual, komodifikasi merupakan cara pandang yang menempatkan segala sesuatu (termasuk didalamnya proses peradilan) sebagai suatu komoditas yang layak dan laku diperjual-belikan. Uang menjadi ukuran yang dominan dan sekaligus menjadi alat tukar komoditas tersebut. Menguatnya komodifikasi sejatinya tidak bisa dilepaskan dari hegemoni kapitalisme terhadap kehidupan

masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, kita masuk pada lubang hitam (*black hole*) kapitalisme tanpa sedikitpun berkesempatan untuk menghindar darinya.¹

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka Pemerintah merasa perlu untuk memperbaharui Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang sering disebut atau disingkat PT, dalam bahasa Belanda *Nederland Venootshap (NV)*.

Pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu:

¹ <http://trbhukum.ekonomi.blogspot>, *Hukum dan Komodifikasi Proses Peradilan*, 22 Mei 2008

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan Tentang Persekutuan, dikatakan:

“ Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”²

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan inilah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang merupakan produk Pemerintah Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

2. Vide Pasal 1618 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Pradnya Paramita, Jakarta 1980

Perubahan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini, tentunya membawa dampak kepada para pelaku usaha di Indonesia, dimana setiap ada perubahan Undang-Undang, para pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroan terbatasnya, yang diberi waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya perundangan tersebut. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dimana dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 157 ayat 3, pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas yang baru diterbitkan dalam batas waktu tertentu, adapun bunyinya sebagai berikut:

“ Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang ini”

Sanksinya yang cukup berat bagi para pelaku usaha terdapat pada Pasal 157 ayat 4, yang berbunyi:

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Para pelaku usaha yang menjalankan perseroan terbatas harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak berlakunya UUPT, atau selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2008. Bagaimana eksistensi perseroan terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam kurun waktu tersebut? Apakah perseroan terbatas tersebut masih diijinkan untuk menjalankan usahanya?. Bagaimana jika Perseroan tersebut mempunyai asset/kekayaan yang bersifat barang tidak bergerak, misalnya ada sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang atasnama Perseroan tersebut. Namun oleh karena satu dan lain hal, Perseroan tersebut, oleh para pelaku usahanya (pengurusnya) belum atau tidak disesuaikan anggaran dasarnya.

Tujuan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, guna memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Hal mana telah diperkenankan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi tematika untuk mendukung *good government* yang *online* kepada seluruh notaris dapat mencegah dan menghapus korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, dan sekaligus

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum maka dibutuhkan adanya suatu persetujuan atau pengesahan dari instansi yang berwenang, di Indonesia dipercayakan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Perdata. Karena perkembangan teknologi dan tuntutan zaman yang semakin hari semakin canggih dan menuju ke arah Globalisasi, maka Pemerintah merasakan perlunya memberikan pelayanan yang cepat dalam bidang usaha demi persaingan dalam memperoleh devisa bagi negara.

Pengesahan atau persetujuan Perseroan Terbatas telah dilakukan melalui internet, agar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak perlu didatangi tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Selain memproses lebih cepat juga menghemat biaya, hal ini telah pula diserahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada suatu perusahaan swasta bernama PT. Sarana Rekatama Dinamika, berkedudukan di Jakarta, yang terkenal dengan

sebutan perusahaan yang menangani Sisminbakum, yaitu singkatan dari sistem administrasi badan hukum.

Pembuatan akta untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas ini haruslah akta otentik, yang dipercayakan kepada Notaris, yaitu seorang Pejabat Umum, yang bekerja secara profesional. Setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat maka diteruskan dengan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sisminbakum tersebut melalui internet. Pemeriksaan internet selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan data fisik yang disampaikan oleh Notaris pembuat akta otentik tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?.
2. Syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat tetap diakui sebagai

Badan Hukum menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas
Nomor 40 Tahun 2007 ?

3. Bagaimanakah status harta kekayaan/asset yang dimiliki Perseroan Terbatas yang tidak/belum menyesuaikan anggaran dasarnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Permasalahan yang diajukan diatas, diharapkan untuk dapat diketahui dan dijelaskan bagaimana pentingnya pengaturan suatu usaha dalam suatu undang-undang yang berlaku nasional dengan mendasarkan pada kepastian hukum yang membawa keseimbangan antara hak dan kewajiban antara para pelaku usaha.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap eksistensi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mendalami dan menganalisa syarat-syarat dan perijinan operasional yang harus dipenuhi suatu Perseroan

Terbatas agar status Badan Hukumnya tetap diakui menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

3. Untuk mendalami dan menganalisa status harta kekayaan/asset yang dimiliki Perseroan Terbatas, jika anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut belum/tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya terdapat persamaan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang lama dan UUPT yang baru, meskipun ada penyempurnaan dan penambahan, sehingga terdapat beberapa perubahan yang perlu dicermati dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan asas dalam UUPT

UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi ...”. Asas ini dalam UUPT Nomor 40 tahun 2007 ditiadakan, hal ini sebagaimana terbaca dari Pasal 1 angka 4 UUPT tersebut, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar”.

2. Penyempurnaan Substansi aturan UUPT

- a. Adanya Kewajiban mencantumkan alamat lengkap Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUPT .
- b. Menarik batas yang tegas mengenai anggaran dasar dan bukan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2) butir a dan b UUPT .
- c. Penertiban Prosedur permohonan dengan cara permohonan elektronik dan penetapan batas waktu permohonan pengesahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal 9 dan Pasal 10 jo Pasal 21 UUPT.
- d. Penyesuaian UUPT dengan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004, yaitu mengenai cara-cara penulisan dengan kuasa yang otentik.
- e. Taat Asas “Tanggung-Renteng” dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Pasal 13 ayat (4) dan (5), Pasal 14 ayat (1) UUPT.
- f. Penertiban batas waktu permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUPT.

- g. Penegasan saat berlakunya perubahan anggaran dasar yang harus diberitahukan kepada Menteri, Pasal 23 (2) UUPT.
- h. Penyempurnaan aturan "*larangan cross holding*" UUPT, Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) UUPT.
- i. Penetapan batas waktu maksimum penguasaan saham yang telah dibeli kembali, Pasal 37 ayat(4) UUPT.
- j. Penetapan adanya 2(dua) cara penurunan modal, yaitu Penarikan Saham dan Penurunan nilai nominal, Pasal 47 UUPT.
- k. Kepastian Hukum tentang Deviden yang tidak diambil dalam waktu 10 tahun untuk masuk kedalam cadangan khusus, Pasal 73 ayat (3) UUPT
- l. Mengenai tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat, Pasal 76 dan 77 UUPT
- m. Menetapkan hukum acara untuk penetapan Izin Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS, Pasal 79 UUPT.
- n. Prinsip kolektivitas bagi anggota Dewan Komisaris, Pasal 107 ayat (4) UUPT, sehingga Dewan Komisaris tidak lagi bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi harus bersama-sama atasnama Dewan Komisaris.

3. Penambahan Substansi Aturan UUPM

- a. Penetapan saat berlakunya perubahan status perseroan menjadi PT Tbk., Pasal 25 ayat (1), (2) UUPM
- b. Penetapan saat berlakunya penggabungan dan pengambilalihan Perseroan, Pasal 26 UUPM
- c. Penegasan tidak ada deviden untuk saham yang dibeli kembali, Pasal 40 ayat(2) UUPM.
- d. Penetapan kewajiban administrasi Direksi untuk penyampaian data untuk Daftar Perseroan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Pasal 56 ayat (3) dan (4) UUPM.
- e. Pengeluaran hak suara tak terpisahkan dari pemilik saham, Pasal 84 ayat (1) dan (2) UUPM
- f. Prosedur Pemberhentian anggota Direksi, termasuk pemberhentian dengan keputusan di luar rapat, Pasal 104 ayat (3) dan (4) UUPM.

4. Perubahan Substansi Aturan UUPM

- a. Adanya batas minimum modal yang ditempatkan/disetor pada saat pendirian perseroan terbatas, Pasal 33 ayat(1) UUPM.
- b. Pembatasan batas waktu delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris, Pasal 39 ayat (1) UUPM.

- c. Mengurangi batas waktu pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penambahan modal, Pasal 41 ayat (2) UUPT.
- d. Penambahan modal ditempatkan/disetor yang tidak melampaui modal dasar bukan merupakan perubahan anggaran dasar, Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) UUPT.

5. Penambahan (dan pengurangan) Substansi Aturan UUPT

- Penegasan Jaminan fidusia saham selain Gadai Saham serta Menghapus ketentuan saham atas tunjuk.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan eksistensi Perseroan Terbatas, sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT tersebut, pelaku usaha wajib menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam jangka waktu 1(satu) tahun, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Penyesuaian Anggaran Dasar perseroan ini, harus dinyatakan dalam akta notariil yang dibuat oleh seorang pejabat umum, dalam hal ini Notaris, dan dalam batas waktu selambat-lambatnya 30(tigapuluh) hari perubahan anggaran dasar atau berita acara rapat yang sudah dinotariilkan harus dimohonkan

persetujuan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang secara mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan juga.

Adapun beberapa pasal yang berkaitan dengan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

Pasal 21 UUPT:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri.

- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 23 UUPT:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam Daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan pemberian status badan hukum tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Berakhirnya status badan hukum perseroan apabila dibubarkan, dilikuidasi, dan tentunya juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan pengaturan yang komprehensif, yang melengkapi berbagai aspek Perseroan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha atau dunia bisnis.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakekat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kemudahan yang diberikan Pemerintah terhadap proses pemberian status Badan Hukum Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UUPT adalah: Penyederhanaan Prosedur, Penyederhanaan Isi Akta Anggaran Dasar Perseroan, Penyederhanaan Persyaratan.

Ad. 1. Penyederhanaan Prosedur³

³ *Inovasi Dan Kemudahan Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Proses Pemberian Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Makalah Dirjen AHU, Departemen Hukum dan HAM, Sosialisasi UUPT, Semarang, 2007.*

Untuk merespon Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penyederhanaan prosedur permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dengan teknologi informasi dan pelayanan satu atap.

a. Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum proses pengesahan pendirian, perubahan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sudah diatur penggunaan Teknologi Informatika sehingga waktu penyelesaian pengesahan paling lambat 14 hari setelah persyaratan dipenuhi serta lengkap, khususnya Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Untuk memperoleh keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. alamat lengkap Perseroan”.

Inisiatif *eGovernment* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good government* dan mempercepat proses demokrasi. Penggunaan Tehnologi Informasi yang *online* kepada seluruh notaris dapat mencegah dan menghapus korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, dan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*).

b. Pelayanan Satu Atap

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, UUPT mengatur mengenai pelayanan satu atap. Hal ini terlihat dalam Pasal 11, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 undang-undang tersebut. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri”, dan pada Pasal 30 UUPT berbunyi:

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
 - b. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuan oleh Menteri.
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan pelayanan dalam satu atap yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi pengesahan pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan, dan melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, menghemat biaya, dan waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Daftar Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam praktek, masih ditemukan proses tanda daftar perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama. Begitu juga pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Negara, selain waktunya cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) bulan, juga biaya cetak akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar yang relatif mahal. Diharapkan dengan adanya pelayanan satu atap di

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ada transparansi waktu, transparansi biaya dan menghilangkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun sampai saat ini, pelaksanaan pelayanan satu atap ini belum berjalan.

Ad. 2. Penyederhanaan Isi Akta Anggaran Dasar Perseroan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah merespon UUPT dengan menyederhanakan isi Akta Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagai acuan dalam menyusun akta anggaran dasar perseroan terbatas berpedoman pada Pasal 15 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu derdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama, jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Materi standar akta yang disusun selain memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang tersebut, juga memperhatikan hal-hal yang diperkenankan oleh undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan, sebagai contoh antara lain Pasal 35 ayat

(3) menyatakan “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Akta anggaran dasar perseroan yang semula memuat 28 Pasal yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh Tim perumus telah berhasil menyederhanakannya menjadi 20 Pasal. Standar akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diantaranya memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Nama dan Tempat Kedudukan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
4. Modal;
5. Saham;
6. Pengganti surat saham;
7. Pemindahan hak atas saham;
8. Rapat umum pemegang saham;
9. Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS;
10. Kuorum, Hak suara dan Keputusan RUPS;
11. Direksi;

12. Tugas dan Wewenang Direksi;
13. Rapat Direksi;
14. Dewan Komisaris;
15. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
16. Rapat Dewan Komisaris;
17. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan;
18. Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden;
19. Penggunaan Cadangan;
20. Ketentuan Penutup.

Perlu ditegaskan bahwa standar akta perseroan ini hanya acuan saja, apabila notaris akan menyusun akta anggaran dasar perseroan yang mengacu pada Pasal 15 UUPT tetap diperbolehkan.

Ad. 3. Penyederhanaan Persyaratan

Persyaratan bagi pendirian perseroan terbatas juga telah disederhanakan, sehingga menjadi:

- a. Salinan akta pendirian Perseroan dan/atau salinan akta perubahan pendirian Perseroan, cukup 1(satu) rangkap.
- b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota Direksi atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-

sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

- d. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak atasnama Perseroan)

Usaha Tim yang mempersiapkan UUPT ini, dengan cermat menetapkan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, maupun perubahannya. Dengan adanya sistim Sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM, proses pengesahan pendirian suatu Perseroan Terbatas atau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan dapat dilakukan secara *on-line* melalui internet, yang Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum diatur sebagai berikut:

- DIAN 1, yaitu istilah Sisminbakum untuk permohonan pengesahan akta pendirian suatu perseroan terbatas;
- DIAN 2, yaitu istilah untuk pengajuan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, termasuk juga untuk penyesuaian anggaran dasar dalam masa peralihan ini.
- DIAN 3, yaitu istilah untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan, seperti halnya perubahan susunan pengurus, penambahan modal disetor.

Selanjutnya, bagaimana status hukum kepemilikan harta kekayaan atau asset dari Perseroan Terbatas tersebut, apabila anggaran dasarnya tidak disesuaikan dengan UUPT. Jika kita cermati Pasal 157 ayat 4 UUPT, apabila dalam batas waktu 1(satu) tahun Perseroan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Oleh karena UUPT ini masih baru, maka belum ada yang dimohonkan pembatalan, namun bagaimana jika hal ini benar terjadi. Dan apabila Perseroan tersebut memiliki beberapa bidang tanah dengan status bersertipikat Hak Guna Bangunan. Lalu bagaimana status kepemilikan tanah-tanah tersebut?

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (doktrinal), karena penelitian ini menyangkut konsekuensi perubahan undang-undang perseroan terbatas sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sekaligus pelaksanaannya dalam masyarakat, dalam hal ini diadakan juga penelitian terhadap beberapa anggaran dasar perseroan terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini mendiskripsikan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengkajinya atau menganalisis sesuai dengan penerapannya dalam Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dalam dunia usaha dengan meneliti Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari Perusahaan yang diteliti Anggaran Dasarnya yang berkaitan dengan permasalahan dan praktek dalam dunia usaha, dan juga data yang berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil karya dari para akademisi hukum, dan doktrin para ahli.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan studi dokumenter dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Metode studi pustaka, yakni data dikumpulkan dari buku-buku, karangan ilmiah, bahan-bahan seminar dan

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

- b. Metode studi dokumenter yakni pengumpulan data dari arsip yang terkait dengan akta-akta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan berlakunya UUPT yang baru.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang bersifat Kualitatif Normatif, yakni dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan eksistensi suatu perseroan terbatas dengan status badan hukum; dan dengan menganalisa data dari perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya, baik yang terlambat maupun yang tidak terlambat.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan tesis ini merupakan analisis terhadap eksistensi perseroan terbatas sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis akan membagi dalam empat bab dan akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab Kesatu merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan berikutnya, yang terdiri

dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Kedua tentang Tinjauan Pustaka, yang merupakan tinjauan umum tentang perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang meliputi beberapa kali perubahan, dan khususnya ketentuan peralihan dalam UUPT, serta kaitannya apabila telah lewat batas waktunya, perseroan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya tetapi memiliki asset/kekayaan.

Bab Ketiga tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang menganalisa pelaksanaan undang-undang perseroan terbatas terhadap eksistensi perseroan terbatas dalam dunia usaha, dan sejauh mana kepatuhan para pelaku usaha dalam menaati Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

Bab Keempat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁴

Dan selanjutnya Pasal 7 ayat (4) berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum”⁵

Yang dimaksud dengan “persekutuan modal” adalah bahwa modal dasar Perseroan terbagi dalam sejumlah saham-saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Sehubungan dengan ini perlu ditegaskan bahwa sekalipun semua saham dimiliki oleh 1(satu) orang, konsep

⁴ . Vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007

⁵ Vide Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007

persekutuan modal tetap valid karena Perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum. Kebenaran ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 7 ayat (7) yang mengatur bahwa 100% saham Persero (BUMN berbentuk perseroan terbatas) dapat dimiliki oleh negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Perbuatan hukum pendirian oleh 2(dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri di satu pihak dan Perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambarnya.⁶ Dengan demikian sesungguhnya antara para pendiri di satu pihak dan Perseroan di lain pihak terjadi hubungan keanggotaan, dan oleh karena itu perbuatan hukum pendirian oleh para pendiri sekaligus mengakibatkan terjadinya penyertaan oleh semua pendiri dalam Perseroan selaku persekutuan modal.⁷

Memperhatikan sifat khas perbuatan hukum pendirian Perseroan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseroan dapat didirikan oleh 1(satu) orang. Kebenaran

⁶ Vide Pasal 33 UUPT

⁷ Tumbuan, Fred B.G. *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi UUPT, Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

kesimpulan dimaksud ditegaskan oleh UUPT yang dalam pasal 7 ayat (7) diatas mengatur bahwa antara lain negara sebagai pendiri tunggal dapat dengan sah mendirikan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang disebut Perusahaan Perseroan atau Persero.

Berbeda dengan badan usaha bukan badan hukum, misalnya Persekutuan Perdata (maatschap), CV, dan Firma, timbulnya perseroan semata-mata karena disepakati/diperjanjikan oleh para pendirinya. Dan disini bukanlah berstatus badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) karena merupakan badan hukum maka dibutuhkan adanya suatu persetujuan atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini di Indonesia dipercayakan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Karena perkembangan teknologi dan tuntutan zaman yang semakin hari semakin canggih dan menuju ke arah globalisasi, maka Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pemerintah merasa perlunya memberikan pelayanan yang cepat dalam bidang usaha demi persaingan dalam memperoleh devisa bagi negara. Sebagaimana yang telah berjalan selama ini, pengesahan atau

persetujuan Perseroan Terbatas telah dilakukan melalui media komunikasi internet, agar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak perlu didatangi tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Selain memproses lebih cepat juga menghemat biaya, hal ini telah pula diserahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada suatu perusahaan swasta, yang bernama Perseroan Terbatas PT. Sarana Rekatama Dinamika, yang berkedudukan di Jakarta, yang terkenal dengan sebutan perusahaan yang menangani Sisminbakum, yaitu singkatan dari sistem administrasi badan hukum.

Namun dalam perkembangannya setelah berjalan lebih kurang 9(sembilan) tahun, maka mulai akhir bulan Januari 2009, pengadministrasian pendaftaran badan hukum telah diambil alih kembali pengelolaannya oleh Direktorat Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan sebutan SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Pembuatan akta untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas ini haruslah akta otentik, yang dipercayakan kepada Notaris, yaitu seorang Pejabat Umum, yang bekerja secara profesional. Setelah Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat maka diteruskan dengan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sisminbakum tersebut melalui internet. Pemeriksaan internet selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan

data fisik yang disampaikan oleh Pejabat Umum pembuat akta otentik tersebut. Adapun tujuan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, guna memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Hal mana telah diperkenankan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi tematika untuk mendukung good government yang online kepada seluruh notaris dapat mencegah dan menghapus korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, dan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dalam Rangka memberikan kemudahan dalam permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, UUPT mengatur mengenai

pelayanan satu atap yaitu mengenai daftar perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, dimana sebelumnya merupakan kewajiban Direksi atau kuasanya, maka menurut UUPT yang baru semuanya ini merupakan tugas Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri, dan dalam Pasal 30 menyatakan Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- b. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Status badan hukum Perseroan Terbatas merupakan salah satu daya tarik bagi investor, disamping daya tarik lain dari sebagai suatu asosiasi modal. Persoalannya sekarang bahwa mengenai kapan mulainya status badan hukum Perseroan Terbatas itu?. Menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT yaitu “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black’s Law Dictionary* dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can*

*function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*⁸. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai person atau sebagai orang.

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk (legal form) yang didirikan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*). Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 24

⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation>

ayat (1) UUPT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 82 UUPT), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 12 huruf b UUPT), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPT).

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: ⁹

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atasnama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Status Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas.

⁹ Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, Agustus 2008, halaman 11.

Salah satu karakteristik mendasar dari suatu perseroan terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “*rechtsperson*”, dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.

Legal entity, dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai “badan hukum” yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban. Pada dasarnya badan hukum adalah subjek hukum yang diakui memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum di samping individu manusia, orang perorangan.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹⁰ Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.¹¹ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta 1987, halaman 182.

¹¹ Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, - PT.Eresco, Bandung, 1979. halaman 36.

yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹²

Dari rumusan di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi atau perorangan. Badan Hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda atau hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Selanjutnya oleh karena badan hukum berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, halaman 84.

menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.¹³

Uraian-uraian diatas adalah penjelasan mengenai Subyek hukum secara materiil. Selain persyaratan materiil tersebut, keberadaan suatu badan hukum sebagai subjek hukum mandiri juga harus didasarkan pada persyaratan formil, yaitu proses pembentukannya yang harus memenuhi formalitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga diakui sebagai subyek hukum mandiri. Dalam perseroan terbatas, saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM itulah yang menjadikan perseroan terbatas itu sebagai badan hukum dalam arti formil.

Sifat badan hukum Perseroan Terbatas, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas. Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus perseroan terbatas, yang di Indonesia dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.¹⁴

¹³ . Gunawan Widjaja , op cit . halaman 14

¹⁴ . Gunawan Widjaja, op .cit. halaman 18

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan merupakan suatu hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan. Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha. Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat.

Pendiri atau pemegang saham dalam perseroan terbatas seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham ini memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam Konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham.

Perlu diperhatikan bahwa selama Perseroan belum memperoleh Status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi Perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.¹⁵ Apabila Perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Karenanya setiap perubahan akta pendirian Perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang

¹⁵ . Vide Pasal 14 ayat (1) UUPT

merupakan akta partai dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

3. Tata Cara Mendirikan Perseroan Terbatas

3.1. Didirikan Minimal Dua “Orang”

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian oleh karena itu sudah selayaknya didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih. Kata “orang” disini apakah hanya “orang” atau “manusia” yang dapat mendirikan perseroan terbatas, ternyata dalam UUPT kata “orang” harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. “Orang” adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan.¹⁶

Istilah yang tepat untuk penyebutan “orang” disini adalah “pihak”. Apabila pendirian perseroan dilakukan oleh dua orang, namun mereka adalah suami isteri, hal ini tidak diperkenankan karena suami isteri dianggap satu pihak. Kecuali mereka memiliki akta pisah harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang tepat adalah kata “pihak” untuk menggantikan kata “orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UUPT.

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal.5

Pendirian perseroan terbatas harus dilakukan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, karena akta pendirian tersebut merupakan akta otentik, yang dapat dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna.

3.2. Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Penggunaan nama Perseroan Terbatas tidak boleh merugikan sesama pengusaha dibidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik, yang sudah memakai nama tersebut secara resmi di dalam akta pendirian dan telah mendapat pengesahan Menteri. Untuk itu tidak diijinkan ada nama yang sama atau hampir sama untuk pemakaian nama perseroan di seluruh Indonesia.

Pada hakekatnya, pengaturan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998, mirip dengan ketentuan tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan jalan pintas ingin

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seijin pemilik merek terkenal yang bersangkutan.

Pemakaian nama perseroan harus diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan. Permohonan tersebut dapat diajukan terlebih dahulu sebelum pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian.

Pasal 5 PP nomor 26 tahun 1998 menentukan permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

3.3. Tempat Kedudukan dan Alamat Tetap

Tempat kedudukan Perseroan Terbatas ditentukan dalam Pasal 5 UUPT, yaitu dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Perbedaan dengan UUPT lama nomor 1 tahun 1995 adalah kewajiban untuk mencantumkan alamat lengkap perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:

- (2). Perseroan mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
- (3) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan.

Tempat kedudukan tersebut, yang dimaksudkan adalah sekaligus merupakan kantor pusat perseroan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, tentang alamat yang dipilih sebagai tempat kedudukan perseroan terbatas, undang-undang mengharuskan supaya tempat kedudukan tersebut disebutkan dalam surat menyurat. Dalam praktek kita temui alamat tersebut diletakkan pada kepala surat, dengan maksud agar perseroan mudah dihubungi. Dan oleh Menteri disyaratkan juga untuk melampirkan Surat Keterangan Lurah setempat mengenai domisili perseroan tersebut, pada saat pengajuan dokumen fisik untuk memohon persetujuan.

3.4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan Perseroan, yang diatur dalam pasal 8 UUPA. Pasal 15 ayat (1) UUPA mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang harus dimuat dalam anggaran dasar suatu perseroan, yaitu:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

3.5. Pengesahan oleh Menteri

Yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie.

UUPT memberi kemudahan untuk pengajuan melalui media elektronik, guna memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Juga menetapkan batas waktu pengajuan pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPT tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

- ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 - (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan keterangan mengenai dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
 - (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
 - (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
 - (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
 - (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
 - (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
 - (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

3.6. Daftar Perseroan Dan Pengumuman

Sebelum diterbitkannya UUPT, kewajiban pendaftaran perusahaan adalah kewajiban perseroan, dan didaftarkan melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. Dengan lahirnya UUPT yang baru ini, maka Pasal 29 dan Pasal 30 mengatur tentang Daftar Perseroan dan Pengumuman. Sehingga saat ini Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri, demikian juga Menteri mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Jadi seharusnya penyelenggaraan Daftar Perseroan dan Pengumuman bukanlah menjadi tugas direksi atau kuasanya. Namun dalam praktek sampai saat ini ketentuan Pasal 30 ini, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan tambahannya sampai saat ini diurus oleh Perseroan melalui Notaris pembuat aktanya. Cetak Berita Negara tersebut diajukan kepada Perum Percetakan Negara di Jakarta. Dan sebelum permohonan pengesahan didahului dengan pembayaran untuk cetak Berita Negara Republik Indonesia.

B. PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS

1. Pengaturan Berdasarkan Periodenisisasi Berlakunya.

1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sebelum UUPT dilahirkan, di negara kita berlaku peraturan perseroan terbatas yang berasal dari jaman kolonial. Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971.

Disamping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939-569 jo 717*).¹⁷

Kedua peraturan ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi. Kemudian lahir lah UUPT yang merupakan produk negara Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini

1.2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995

¹⁷ Gatot Supramono, op cit halaman 1

Salah satu pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum. Materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang peninggalan zaman kolonial.

Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini, Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing peningkatan kerjasama international, sistem perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya.

Dengan diundangkannya UUPT nomor 1 Tahun 1995, pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Presiden Republik Indonesia,

yang waktu itu adalah (Almarhum) Soeharto, maka Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini termuat dalam Ketentuan Penutup, Pasal 128 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 .

1.3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Zaman Kolonial sebagaimana diuraikan di atas, hanya berlaku dalam kurun waktu 12 tahun. Karena Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu perbedaan yang cukup menonjol antara UUPT ini dengan peraturan yang digantikannya (UU nomor 1 tahun 1995) adalah adanya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UUPT. Pencantuman TJSL sebagai suatu syarat yang diwajibkan bagi perseroan sebenarnya merupakan hal yang tidak lazim mengingat konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* konsep yang diadaptasi menjadi TJSL dalam UUPT bukanlah ketentuan yang *mandatory* dalam ketentuan tentang perseroan di negara lain.

Di satu sisi, penerapan syarat TJSL (ditambah ketentuan sanksi atas pelanggarannya) dalam UUPT dapat menjadi sarana penekan bagi para pemodal yang selama ini dikenal nakal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Namun di sisi lain, golongan pengusaha yang selama ini disiplin menerapkan CSR akan merasa kehilangan nilai kesukarelaan dalam setiap aktivitas CSR mereka. Konsep asli CSR sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu:¹⁸

1. *transparant*;
2. *accountable*;
3. *respect to stake holder*;
4. *ethically*;

¹⁸ . [http:// en.wikipedia.org/wiki/corporate](http://en.wikipedia.org/wiki/corporate).

5. *respect to the rule;*
6. *human rights;*
7. *respect to the international norms.*

Prinsip-prinsip di atas diharapkan dapat diterapkan oleh setiap perseroan dalam melaksanakan CSR. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan CSR, namun berbagai macam hal yang harus diperoleh oleh perseroan, seperti pencapaian standar tertentu melalui ISO, menuntut setiap perseroan untuk menerapkan CSR.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di UUPT termuat dalam Pasal 74 UUPT, yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan konsep asli CSR, segala hal yang diwajibkan oleh UUPT kepada perseroan di Indonesia melalui “ketentuan mewajibkan TJSL” nya, sebenarnya telah tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Hukum di negara ini telah mengatur hal-hal

yang termasuk tujuh isu utama dalam konsep CSR sebagai berikut:¹⁹

1. *Organisational governance* diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. *Environment* diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. *Labour practices* diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. *Consumer issues* diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. *Fair operating practices* diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. *Human rights* diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. *Social and economic development* diatur antara lain dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dan lain sebagainya.

Keberadaan aturan-aturan di atas membuat pencantuman Pasal 74 dalam UUPT terkesan mubazir dan dipaksakan. Sekilas terlihat, pembentukan dan pencantuman pasal ini bersifat “mencari popularitas” mengingat pembahasan RUU PT ini tidak jauh berselang setelah terjadinya kasus lumpur panas di Sidoarjo. Melalui Pasal 74 ini, legislator di DPR seperti memilih jalan keluar untuk “menghukum” semua perusahaan walaupun hanya satu perusahaan, yaitu Lapindo. Salah satu contoh Perseroan yang telah melaksanakan prinsip TJSL ini adalah “Starbuck Corp” di Indonesia.

¹⁹ Ibid.

2. Sistematika UUPM Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini, diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, terdiri dari XIV BAB, 161 Pasal. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Tabel 1: Sistematika UUPM Nomor 40 Tahun 2007

BAB	URAIAN	PASAL
I	KETENTUAN UMUM	1 - 6
II	PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN - Bagian Kesatu: Pendirian - Bagian Kedua : Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Paragraf 1 Paragraf 2 - Bagian Ketiga: Daftar Perseroan Dan Pengumuman Paragraf 1: Daftar Perseroan Paragraf 2: Pengumuman	7 - 14 15 - 18 19 - 28 29 30
III	MODAL DAN SAHAM - Bagian Kesatu: Modal - Bagian Kedua : Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan ... - Bagian Ketiga : Penambahan Modal - Bagian Keempat: Pengurangan Modal - Bagian Kelima : Saham	31 - 36 37 - 40 41 - 43 44 - 47 48 - 62
IV	RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA - Bagian Kesatu: Rencana Kerja - Bagian Kedua : Laporan Tahunan - Bagian Ketiga : Penggunaan Laba	63 - 65 66 - 69 70 - 73

V	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	74
VI	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	75 - 91
VII	DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS - Bagian Kesatu: Direksi - Bagian Kedua : Dewan Komisaris	92 - 107 108 - 121
VIII	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN	122 - 137
IX	PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN	138 - 141
X	PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN	142 - 152
XI	BIAYA	153
XII	KETENTUAN LAIN	154 - 156
XIII	KETENTUAN PERALIHAN	157 - 158
XIV	KETENTUAN PENUTUP	159 - 161

Sumber: Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

DAN KONSEKUENSINYA.

C.1. Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas Sebagai

Badan Usaha

Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi bahwa para pelaku usaha harus menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan UUPT tersebut, selain itu semua organ perseroan juga harus

mengikuti ketentuan dalam UUPT. Perseroan pada hakekatnya adalah badan hukum/subyek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya Perseroan mutlak membutuhkan organ, yaitu:

1. RUPS, dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan perseroan.
2. Direksi, yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili Perseroan
3. Komisaris, yang oleh UUPT ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Memperhatikan keadaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut Perubahan UUPT juga membawa beberapa perubahan mengenai Organ Perseroan sebagaimana diatur dalam perundangan sebelumnya, yaitu mengenai :

- a. Kedudukan RUPS bukan lagi sebagai organ tertinggi dalam suatu Perseroan.
- b. Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- c. Adanya Direksi Independence

- d. Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama.
- e. Adanya Dewan Syariah.
- f. Konsep Pemisahan Menurut UUPT

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Yang membedakan antara UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang organ perseroan adalah: bahwa dalam UUPT yang baru tidak lagi mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan yang tertinggi. Hal ini termuat dalam pasal 1 butir 4 UUPT baru yang berbunyi: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

UUPT Nomor 40 tahun 2007 telah memiliki aturan-aturan yang tegas mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris, sebagai berikut:

1. Pasal 75 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan RUPS dimana dijelaskan bahwa RUPS mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

2. Pasal 92 ayat (1) UUPM mengatur mengenai kewenangan direksi, dimana dikatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) UUPM juga diberikan penjelasan lebih lanjut bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.
3. Pasal 108 ayat(1) UUPM mengatur mengenai kewenangan dewan komisaris di mana disebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam Pasal 114 ayat (1) UUPM menegaskan kembali bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi dan rencana kerja Direksi untuk tahun berjalan. Dalam RUPS tahunan ini

diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Karena itu Direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, dalam rangka memberikan pertanggungjawaban Direksi.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, namun apabila semua pemegang saham hadir atau terwakili dapat diadakan dimana juga, asal saja dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perkembangan UUPT, memberikan kemungkinan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya, sehingga memungkinkan penandatanganan secara fisik atau secara elektronik, hal mana sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Hal ini tidak kita temui dalam perundangan sebelumnya, baik di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995. Dan ini merupakan perkembangan era globalisasi, yang menuju modernisasi di bidang elektronik.

Direksi sebagai penyelenggara RUPS, bertugas menyiapkan semuanya yang berhubungan dengan rapat, mulai dari pemanggilan para pemegang saham, pengumuman di media massa. Akan tetapi apabila semua pemegang saham dapat hadir dalam RUPS, maka pengumuman yang demikian tidak dibutuhkan, dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah. Dalam Rapat tersebut, pimpinan rapat adalah Direksi, dalam hal Direksi tidak ada yang hadir maka dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang hadir.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁰

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri, perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi-bagi ke dalam organ-organ sebagaimana diuraikan diatas, yang masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Direksi adalah organ yang mempunyai tugas melakukan/ melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atasnama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya kerana berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Dengan demikian *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang

²⁰ Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*.

batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan.²¹

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L.Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, yang dikutip dalam buku Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, menyatakan²².

In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged, There are:

- (1) that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- (2) that they must not exercise the powers conferred upon them for purpose difference from those for which they were conferred;*
- (3) that they must fetter their discretion as to how they shall act;*
- (4) that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

²¹ Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, Agustus 2008, halaman 42

²² Ibid halaman 43

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:²³

1. bertindak dengan itikad baik;
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Jadi antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi, sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan tugas pengurusan Perseroan, dan keberadaan Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi. Disini terlihat adanya hubungan kepercayaan antara Direksi dengan perseroan. Hubungan ini dinamakan *fiduciary relation*, yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty* bagi Direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi perseroan, dalam segala macam

²³ Opcit halaman 44

tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian berarti syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan *fiduciary duty* adalah *fairness*.

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) tersebut, secara umum ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:²⁴

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan. Sebagai *trustee*, direksi bertanggung jawab kepada perseroan sehubungan dengan berkurangnya nilai harta kekayaan perseroan yang dipercayakan untuk diurus olehnya.
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen, direksi mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga, Direksi mengikat perseroan dan bukan pemegang saham perseroan. Sebagai agen, direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan.

Hukum Perseroan Terbatas berkembang sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi, dimana dalam UUPT nomor 40 tahun 2007 Direksi diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

²⁴ Op cit halaman 45

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian, dan harus disahkan dalam RUPS yang pertama kali diadakan, terhitung sejak anggaran dasar perseroan disahkan. Pengangkatan tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam RUPS. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2(dua) orang anggota Direksi.²⁵

Pada umumnya Direksi adalah orang yang memiliki Perseroan, yang memiliki saham dalam Perseroan. Namun UUPT tidak melarang untuk pengangkatan Direksi yang independen, yaitu Direksi bukan dari pemegang saham. Maksudnya Direksi perseroan dari orang luar yang diharapkan dapat mengurus perseroan independen dan dapat bekerja secara professional, sehingga mampu meraih tujuan perseroan seperti diharapkan dalam anggaran dasar. Apabila Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka mereka berhak mewakili perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

²⁵ Vide Pasal 92 ayat (4) UUPT

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) UUPM. Pembahasan tentang Komisaris ini, ada beberapa hal yang pembahasannya sama dengan pembahasan Direksi di atas.

Penyempurnaan substansi aturan UUPM dalam menegakkan taat asas prinsip kolektivitas anggota Dewan Komisaris, dan hal ini tidak diatur dalam UUPM nomor 1 tahun 1995 yaitu Dewan Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, hal ini tercantum dalam Pasal 108 ayat (4) UUPM sebagai berikut:

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain Dewan Komisaris, Pasal 109 UUPT juga mengatur adanya Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang berdasarkan prinsip syariah, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, biasanya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Perbuatan yang memerlukan persetujuan komisaris adalah yang menyangkut harta kekayaan perseroan. Bahkan apabila menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari setengahnya, maka harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Organ Perseroan inilah yang menjalankan tugas dan kewajiban Perseroan, dan bertanggungjawab untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap UUPT yang baru. Oleh Undang-Undang diberi waktu 1(satu) tahun guna menyesuaikan anggaran dasarnya, namun dalam prakteknya

masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, namun Perseroan tersebut tetap beroperasi seperti biasa, dan ada juga yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya. Keterlambatan tersebut tidak menghalangi anggaran dasar tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C.2. Perubahan Prosedure Pendirian Perseroan Terbatas

Perubahan perundangan mengenai Perseroan Terbatas ini, dari zaman kolonial sampai tahun 1995, dalam kurun waktu yang cukup lama, namun setelah itu dalam waktu 12 (duabelas) tahun sudah dirubah lagi, dengan mencabut peraturan yang lama, yaitu UU nomor 1 Tahun 1995. Kemudian lahirlah UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang berlaku sampai sekarang. Kurun waktu 12(duabelas) tahun dirasakan cukup cepat jika dibandingkan dengan perundangan yang sebelumnya.

Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi terhadap pelaku usaha di Indonesia. Dimana dalam Pasal 157 ayat (3) mengenai Ketentuan Peralihan mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan UUPT ini. Adapun jangka waktu yang diberikan adalah 1(satu) tahun terhitung

sejak diundangkannya UUPT ini, yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008. Kewajiban ini disertai sanksi yang tercantum dalam Pasal 157 ayat (4), yaitu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sanksi tersebut, jika kita hubungkan dengan Perseroan Terbatas yang memiliki asset/kekayaan berupa tanah, bagaimana status tanah yang dimiliki apabila Perseroan tersebut dibubarkan, yang disebabkan karena tidak memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sedangkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, memberikan waktu 2(dua) tahun untuk penyesuaian dan tidak ada ancaman atau sanksi yang tercantum dalam aturan peralihan. Lalu dalam prakteknya sampai sekarang masih banyak Perseroan Terbatas yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Bahkan ada yang sudah melewati batas waktu tanggal 16 Agustus 2008 baru memperbaharui anggaran dasarnya, dan ternyata juga mendapat persetujuan dari Menteri. Lalu bagaimana konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas menurut UUPT yang terbaru?

C3. Konsekuensi Harta Kekayaan/asset Perseroan Terbatas

Status prseroan terbatas sebagai suatu badan hukum atau subyek hukum artificial, yang diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan, dapat memiliki harta benda sebagai kekayaan perseroan, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Harta bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, yang dibeli dengan menggunakan nama perseroan. Kendaraan baik roda empat maupun roda dua, jika dibeli dengan uang perseroan dan diatasnamakan perseroan tersebut, maka terbitlah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nama Perseroan. Demikian juga mesin-mesin untuk keperluan produksi dalam perseroan, dibeli oleh perseroan sebagai kekayaan perseroan maka faktur pembelian tersebut memakai nama perseroan. Terhadap kekayaan bergerak ini juga dapat dijadikan jaminan untuk suatu hutang, dengan nama Jaminan Fidusia atau Jaminan Kepercayaan.

Harta tidak bergerak, seperti halnya tanah. Perseroan terbatas dapat memiliki tanah sebagai harta kekayaan/asset

perseroan, namun dibatasi hanya jenis hak tertentu yang boleh dimiliki oleh suatu perseroan. Perseroan terbatas hanya boleh memiliki Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Sewa, dan lain sebagainya, namun hanya badan hukum tertentu yang boleh memiliki Hak Milik. Hak milik adalah hak turutn-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi:

- (1) Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badanh hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Pasal 21 ayat(2) tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu terbatas pada badan-badan hukum, yang untuk penunaian tugas dan usahanya yang tertentu benar-

²⁶ Vide Pasal 20 *Undang-Undang Pokok Agraria*.

benar memerlukan tanah dengan hak milik, yaitu Bank-bank Negara, Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian, badan-badan keagamaan dan sosial. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang termasuk badan hukum, tidak diatur untuk memiliki Hak milik.

Perlu diperhatikan bahwa selama Perseroan belum memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPA, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi Perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atasnama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selama Perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga Direktur belum boleh bertindak untuk dan atasnama perseroan dalam hal pembelian suatu asset/harta kekayaan, terutama untuk pembelian barang tidak bergerak seperti tanah.

Bagaimana jika suatu Perseroan Terbatas yang telah memiliki beberapa bidang tanah Hak Guna Bangunan sebagai harta kekayaan perseroan tersebut, setelah berlakunya UUPA nomor 40 tahun 2007, tidak atau belum menyesuaikan

anggaran dasarnya, apakah kepemilikan atas tanah tersebut masih diakui atau tetap eksis? Apa lagi jika kita hubungkan dengan Pasal Peralihan UUPA, yang memberikan sanksi yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) yaitu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau yang berkepentingan.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan

Terbatas.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), para pelaku usaha wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya UUPT, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, sehingga batas waktu penyesuaian anggaran dasar berakhir pada tanggal 16 Agustus 2008, untuk meneliti lebih lanjut ketaatan para pelaku usaha dalam mematuhi aturan ini, ataupun apa sanksinya jika terlambat menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan peraturan peralihan UUPT tersebut. Pada prinsipnya yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar adalah Direksi perseroan, akan tetapi apabila Direksi berhalangan ataupun tidak mengajukan sendiri karena

kesibukannya, maka yang boleh diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan adalah seorang pejabat umum pembuat akta otentik tersebut, dalam hal ini seorang notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, demikian menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁷ Dengan demikian

²⁷ UU No. 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, hal. 2, CV.Mitra Darmawan, Jakarta, 2004

yang berwenang membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas, atau akta Perubahan Anggaran Dasar, yang sering disebut akta Risalah Rapat pada saat suatu perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, adalah seorang Notaris. Adapun akta yang dibuat, dapat berupa:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- b. Akta Risalah Rapat, yang berisi perubahan anggaran dasar
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang berisi perubahan anggaran dasar.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas memerlukan pengesahan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), yang merupakan syarat sahnya suatu Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, sedangkan Perubahan anggaran dasar juga dibedakan antara perubahan yang memerlukan pengesahan Menteri, perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, perubahan yang cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri saja. Perubahan yang memerlukan pengesahan Menteri, adalah perubahan yang menyangkut perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan pada Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 2 tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dan Pasal 4 tentang Modal.

Perubahan yang tidak menyangkut anggaran dasar, yang memerlukan pelaporan misalnya perubahan yang menyangkut pengoperan saham antar sesama pemilik saham, yang tidak merubah modal dasar dan modal disetor. Perubahan yang tidak menyangkut perubahan anggaran dasar, yang cukup dengan pemberitahuan, misalnya merubah susunan pengurus perseroan, baik itu susunan Direksi maupun susunan Dewan Komisaris. Baik Pelaporan maupun Pemberitahuan, ada Surat Jawaban dari Menteri tentang telah diterimanya laporan dan pemberitahuan tersebut dan telah dicatat dalam data base sisminbakum.

Penyesuaian anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk Perubahan yang memerlukan pengesahan, karena merubah seluruh anggaran dasar. Pada saat berakhirnya masa berlakunya penyesuaian anggaran, yaitu tanggal 16 Agustus 2008 ditambah 30(tigapuluh) hari sehingga batas waktu menjadi tanggal 16 September 2008, proses permohonan pengesahan ditutup oleh Pengelola Sisminbakum, sehingga para notaris se Indonesia tidak bisa mengakses untuk memasukkan data pengesahan. Ditentukannya tanggal 16 September 2008, dikarenakan Pasal 10 ayat (5) UUPA yang memberikan waktu 30(tigapuluh) hari kepada para notaris di Indonesia untuk mengajukan pengesahan.

Pemblokiran ini cukup membingungkan pelaku usaha dan para notaris. Pemblokiran atau penutupan ini dilakukan karena ada anggapan para pemilik badan hukum perseroan tidak taat asas. Maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat fakta integritas dan pemblokiran. Pemblokiran itu dilakukan hanya karena fakta integritas tidak terlewati. Dasar hukumnya sudah jelas, yakni Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Hal tersebut tidak diatur dalam UUPT, untuk itulah Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia meminta pemblokiran ini dibuka kembali, demikian penjelasan Doddy Radjasa Waluyo, SH, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris ini terus berjuang agar fakta integritas dicabut karena tidak sesuai dengan UUPT, apalagi pelayanan terhadap publik ini tidak boleh tertunda, kalau tertunda otomatis aktivitas bisnis tidak bisa berjalan.²⁸ Akhirnya atas perjuangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka fakta integritas tersebut dicabut kembali oleh Dirjen Administrasi Hukum dan Umum.

Oleh karena satu dan lain hal, maka Pengelola Sisminbakum, yang ditangani oleh PT. Sarana Rekatama, berkedudukan di Jakarta, terhitung sejak Januari 2009 telah

²⁸ *Berita Bulanan Notaris*, PPAT & HUKUM, edisi Desember 2008. Nomor 7.67.VI. halaman 11.

dihentikan, dan pengesahan anggaran dasar diambil alih sendiri oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengganti nama Sisminbakum menjadi SABH (Sistim Administrasi Badan Hukum), namun sampai akhir bulan Pebruari 2009 ini, belum berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya hal ini menghambat iklim investasi di Indonesia.

Berikut ini adalah kasus perseroan terbatas yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya, namun tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri tentang persetujuan anggaran dasar.

Kasus: Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasar.

Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Mekar, adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan berkedudukan di Kota Magelang, Jalan Sunan Ampel nomor 56, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, yang bergerak di bidang Perdagangan bahan baku tekstil, dengan Modal Dasar Rp 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah), didirikan pada tanggal 22 Agustus 2005, berdasarkan akta Notaris Yanti Susanti Tan, Sarjana Hukum, Nomor 16, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan keputusannya tanggal 19 Oktober 2005, Nomor: C-28840 HT.01.01.TH.2005, dan telah diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2008 nomor 5985, Tambahan nomor 39.

Perseroan tersebut berjalan lancar dari hari ke hari dan sejak berdirinya sampai sekarang selalu beroperasi sebagaimana mestinya dengan susunan pengurus 2(dua) orang anggota Direksi dan 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris. Demikian juga saham-saham dimiliki oleh ketiga orang pengurus tersebut, dengan jumlah modal yang disetor Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah).

Sampai batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang ditentukan yaitu tanggal 16 Agustus 2008, Perseroan terbatas PT. Utama Jaya Mekar ini belum menyesuaikan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT, dengan alasan belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru.

Kemudian pada bulan September 2008, Direktur Utama perseroan tersebut mendatangi notaris, dan bermaksud mengadakan perubahan susunan pengurus

karena ada yang mengundurkan diri, demikian juga mengoperkan saham dari direktur yang keluar, sekaligus memperbesar modal dasar. Oleh karena akta anggaran dasar Perseroan tersebut belum disesuaikan dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka atas saran notaris sekaligus disesuaikan dengan UUPT, sehingga perseroan harus mengadakan panggilan kepada semua pemegang saham guna diadakan rapat dan dibuatlah akta Risalah Rapat pada tanggal 20 September 2008, bertempat di kantor notaris, Jalan Kolonel Sugiyono nomor 12, Magelang. Rapat diadakan di Kantor Notaris, dan Notaris diminta untuk membuat risalah mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari perseroan tersebut diatas, yang diadakan pada tanggal 20 September 2008, pukul 09.00 (sembilan) .

Dalam rapat ini hadir para pemilik saham dan calon pemilik saham yang diundang khusus untuk mengikuti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama dan menjelaskan bahwa dalam rapat ini hadir dan diwakili sebanyak 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominalRp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) atau

seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah), atau merupakan semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini.

Bahwa rapat adalah sah, walaupun tidak diadakan panggilan dengan iklan terlebih dahulu, oleh karena semua saham telah diwakili dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan;. Oleh karena saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan, karena menurut keterangan Ketua, saham-saham tersebut belum dicetak dan Ketua menjamin bahwa keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan tersebut diatas;

Rapat ini diadakan sehubungan dengan maksud perseroan hendak:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Purwiantoro tersebut selaku Direktur.
2. Menyetujui pengoperan seluruh saham milik Tuan Purwiantoro kepada Nyonya Berlianti Ekana.
3. Meningkatkan Modal Dasar dan Modal Disetor;
4. Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Selanjutnya oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh para yang hadir maka setelah diadakan perundingan sekedarnya, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat:

1. Menyetujui Pengunduran diri Tuan Purwiantoro tersebut dari jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mengadakan perubahan seluruh Susunan Pengurus dalam Perseroan, baik Direksi maupun Komisaris, sehingga pengangkatan baru seluruh anggota direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:

a. Direktur: Tuan Welly Luxza Pradana, lahir di Semarang, pada tanggal 25-10-1981 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Magelang, Villa Gading Mas nomor A-18, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 33.7101.251081.0001.

b. Komisaris Utama: Tuan Setio Wibowo, lahir di Kutawinangun, pada tanggal 21-06-1960 (duapuluh satu Juni seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Magelang, Villa Gading Mas nomor A-18, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 33.7101.210660.0003;

- c. Komisaris : Nyonya Berlianti Ekana, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-05-1962 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus enampuluh dua), Warganegara Indonesia, Rumah tangga, bertempat tinggal di Magelang, Villa Gading Mas nomor A-18, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 33.7101.670562.0001.

Antara pihak yang keluar dan pihak yang mengelola Perseroan telah diadakan perhitungan dan pelunasan satu sama lainnya, sehingga pihak yang satu tidak mempunyai tuntutan atau tagihan berupa apapun juga kepada pihak lainnya, dan mengenai hal itu para pihak telah saling memberikan pembebasan dan pemberesan (acquit et decharge).

2. Menyetujui pengoperan seluruh saham milik Tuan Purwiantoro kepada Nyonya Berlianti Ekana, sebanyak 30 (tigapuluh) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,-- (tigapuluh juta rupiah).

3. Menyetujui peningkatan Modal Dasar yang semula sebesar Rp 400.000.000,--(empat ratus juta rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah), dan meningkatkan modal disetor yang semula Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) menjadi Rp 250.000.000,-- (duaratus limapuluh juta rupiah), selanjutnya menyetujui tambahan modal disetor tersebut diambil bagian dan disetor penuh, masing-masing oleh: Tuan Setio Wibowo tersebut sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) dan Nyonya Berlianti Ekana tersebut sebanyak 50 (limapuluh) saham atau sebesar Rp 50.000.000,-- (limapuluh juta rupiah). sehingga untuk selanjutnya Susunan Pemilikan Saham menjadi sebagai berikut:

- a. Tuan Setio Wibowo tersebut, sebanyak 140 (seratus empatpuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 140.000.000,-- (seratus empatpuluh juta rupiah).
- b. Nyonya Berlianti Ekana tersebut, sebanyak 80 (delapanpuluh) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 80.000.000,-- (delapanpuluh juta rupiah).

- c. Tuan Welly Luxza Pradana tersebut, sebanyak 30 (tigapuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,-- (tigapuluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,-- (duaratus limapuluh juta rupiah).

4. Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar guna memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas berpedoman pada Pasal 15 UUPA, maka Anggaran Dasar PT.Utama Jaya Mekar tersebut memuat 20 (duapuluh) Pasal, yang terdiri dari:

Pasal 1 : Nama Dan Tempat Kedudukan.

Pasal 2 : Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.

Pasal 3 : Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

Pasal 4 : Modal

Pasal 5 : Saham

Pasal 6 : Pengganti Surat Saham.

Pasal 7 : Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 8 : Rapat umum Pemegang Saham

Pasal 9: Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan Rapat

Pasal 10 : Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan RUPS

Pasal 11 : Direksi

Pasal 12 : Tugas Dan Wewenang Direksi

Pasal 13 : Rapat Direksi

Pasal 14 : Dewan Komisaris

Pasal 15 : Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 16 : Rapat Dewan Komisaris

Pasal 17 : Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan

Tahunan

Pasal 18: Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen

Pasal 19 : Penggunaan Cadangan

Pasal 20 : Ketentuan Penutup

Dengan demikian Anggaran Dasar PT. Utama Jaya Mekar tersebut, telah memuat ketentuan yang ditentukan dalam UUPT, selain itu anggaran dasar juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dan yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga

Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham
- b. Nomor surat saham
- c. Nilai nominal saham
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.

Surat Saham yang rusak dapat diganti, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. Surat saham yang demikian harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham berikutnya, demikian juga jika Surat Saham hilang. Khusus PT. Utama Jaya Mekar tersebut, saham-sahamnya belum dicetak, selain tergolong perusahaan yang baru atau belum lama berdirinya, juga para pemilik saham ini masih mempunyai hubungan keluarga. Jadi masih termasuk perseroan keluarga.

Dilihat dari pemilik sahamnya, maka PT. Utama Jaya Mekar tersebut adalah Perseroan yang bersifat tertutup, bukan terbuka (Tbk). Setiap pemindahan saham harus dibuatkan akta pemindahan dan disetujui dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, serta dilanjutkan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang dibuat dalam akta notariil.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: RUPS tahunan, RUPS luar biasa. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Direksi

mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang-saham yang hadir dalam RUPS. Apabila semua pemegang saham hadir, maka

panggilan melalui koran atau surat tercatat tidak dibutuhkan lagi.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari **seorang** anggota Direksi, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
- c. menjadi penjamin (borg) atasnama Perseroan

Direksi harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan ini mengingatkan kita bahwa Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4), yang berbunyi:

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu, atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis

dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Dalam hal ini PT. Utama Jaya Mekar baru mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali, sejak anggaran dasar Pendirian Perseroan Terbatas yang pertama , dan selama 3(tiga) tahun sejak berdirinya tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Demikian juga Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, dan salah satunya menjabat Komisaris Utama, Dewan Komisaris ini diangkat untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi masing-masing yang bersangkutan.

Kemudian Direksi PT. Utama Jaya Mekar memberi kuasa kepada Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Akta Risalah Rapat tersebut, kemudian dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pembuat Akta tersebut, dan dalam waktu yang tidak lebih dari 3(tiga) bulan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Desember 2008 Nomor AHU-95078.AH.01.02.Tahun 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Daftar Perseroan

Nomor AHU-0120105.AH.01.09.Tahun 2008, Tanggal 10 Desember 2008. Walaupun pada saat itu fakta integritas yang diwajibkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum masih belum dicabut, sehingga Direktur perseroan terbatas PT.Utama Jaya Mekar harus menandatangani fakta integritas. Dalam hal ini, Direktur perseroan berkomentar, wah seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja, pakai fakta integritas segala.

Apabila kita amati secara seksama, maka penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat kita bedakan konsekuensi yuridis dan konsekuensi non yuridis lebih lanjut sebagai berikut:

1.1. Konsekuensi Yuridis.

Secara Yuridis, pengurus PT. Utama Jaya Mekar tersebut telah memenuhi kewajibannya menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru. Perseroan tersebut baru berdiri tahun 2005 dan baru beroperasi selama 3(tiga) tahun, yaitu sampai tahun 2008, pengurus perseroan sudah mengalami 2(dua) jenis Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 tahun 2007.

PT. Utama Jaya Mekar tersebut memiliki dua anggaran dasar yang berdasarkan dua Undang-Undang Perseroan Terbatas

yang berbeda pula, yaitu Akta Pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar tanggal 22 Agustus 2005 masih mengikuti UUPT Nomor 1 Tahun 1995, sedangkan Akta Risalah Rapat yang dibuat tanggal 20 September 2008 yang merupakan penyesuaian dengan UUPT baru, telah mengikuti penyesuaian dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang juga berisi seluruh anggaran dasar Perseroan. Dalam Tenggang waktu yang amat singkat ini, Perseroan memiliki dua anggaran dasar yang berbeda. Kalau kita bandingkan kedua akta yang dimiliki oleh Perseroan terbatas tersebut, yaitu Akta Pendirian yang memuat seluruh anggaran dasar dan Akta Penyesuaian seluruh anggaran dasar perseroan yang dimiliki PT.Utama Jaya Mekar tersebut, maka dapat terlihat perbedaannya dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Perbedaan Anggaran Dasar PT. Utama Jaya Mekar

Uraian	Akta tanggal 20 September 2008	Akta tanggal 22 Agusts. 2005
Nama dan Tempat Kedudukan	- Diuraikan dengan jelas alamat Perseroan (Pasal 5 ayat 2 UUPT)	- Tidak diurai kan
Jangka Waktu	- Tidak ditentukan	- Tidak ditentu kan
Saham	- Uraian pemilik saham pada akhir akta/Pasal 20	- Uraian pemilik saham pada

	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Modal Ditempatkan harus disetor penuh (pasal 33 ayat 1) - Uraian mengenai saham dikurangi pasalnya, hanya 3 pasal. - Larangan “cross-holding” (mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau perseroan lain) 	<p>Pasal 4 akta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setor penuh juga - Ada 5 Pasal - Belum diatur
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Diurus seorang Direktur - Bertanggung-jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan - Hal-hal tertentu memerlukan persetujuan dewan Komisaris - Ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Pasal 74) - Ada batas waktu jabatan Direktur (sesuai AD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diurus seorang Direktur - sama - Hal-hal tertentu cukup dengan persetujuan seorang Komisaris - Tidak ada - Batas waktu ditetapkan 5 tahun
Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan dewan dan harus bertindak bersama-sama - Menetapkan peran Dewan Komisaris yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Boleh bertindak sendiri-sendiri - Boleh bertindak sendiri-sendiri

RUPS	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal setahun sekali - Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa - Dapat dilakukan melalui media elektronik (Pasal 77) - Panggilan diabaikan: semua pemegang saham hadir 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal enam bulan sekali - sama - Di wilayah Republik Indonesia - sama
------	---	--

Sumber: Akta Risalah Rapat PT. Utama Jaya Mekar tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar

PT. Surya Sido Agung Mulya berkedudukan di Kabupaten Magelang, juga memiliki dua akta yang berisi anggaran dasar Perseroan dalam dua periode berlakunya kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, yaitu akta tanggal 27 Pebruari 1998 nomor 14 dan akta tanggal 26 Juni 2008 nomor 21, yang jika dibandingkan dapat terlihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Perbedaan Anggaran Dasar

PT. Surya Sido Agung Mulya

Uraian	Akta tanggal 26 Juni 2008	Akta tanggal 27 Pebr. 1998
Nama dan Tempat Kedudukan	- Diuraikan dengan jelas alamat Perseroan (Pasal 5 ayat 2 UUPT)	- Tidak diuraikan
Jangka Waktu	- Tidak ditentukan	- Tidak ditentukan

Saham	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian pemilik saham pada akhir akta/Pasal 20 - Semua Modal Ditempatkan harus disetor penuh (pasal 33 ayat 1) - Uraian mengenai saham dikurangi pasalnya, hanya 3 pasal. - Larangan “cross-holding” (mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau perseroan lain) 	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian pemilik saham pada Pasal 4 akta. - Setor penuh juga - Ada 5 Pasal - Belum diatur
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Diurus seorang Direktur - Bertanggung-jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan - Hal-hal tertentu memerlukan persetujuan dewan Komisaris - Ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Pasal 74) - Ada batas waktu jabatan Direktur (sesuai AD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diurus seorang Direktur - sama - Hal-hal tertentu cukup dengan persetujuan seorang Komisaris - Tidak ada - Batas waktu ditetapkan 5 tahun
Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan dewan dan harus bertindak bersama-sama - Menetapkan peran Dewan 	<ul style="list-style-type: none"> - Boleh bertindak sendiri-sendiri - Boleh bertindak

	Komisaris yang lebih jelas	sendiri-sendiri
RUPS	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal setahun sekali - Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa - Dapat dilakukan melalui media elektronik (Pasal 77) - Panggilan diabaikan: semua pemegang saham hadir 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal enam bulan sekali - sama - Di wilayah Republik Indonesia - sama

Sumber: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sido Agung Mulya.

PT. Rejotumoto Kencono berkedudukan di Kabupaten Magelang, yang juga termasuk Perseroan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya, dimana Akta Berita Acara Rapat tanggal 23 Juli 1996 nomor 63 mengacu pada UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dan selanjutnya akta Risalah Rapat tanggal 19 Nopember 2008 nomor 18 mengacu pada UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Kedua akta dengan judul yang berbeda, namun sebenarnya maknanya sama, yaitu merupakan notulen suatu rapat. Perbedaan istilah ini hanya dikarenakan kedua akta tersebut dibuat di Notaris yang berbeda. Jadi hanya penggunaan istilah yang berbeda. Perbandingan kedua akta tersebut dapat terlihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Perbedaan Anggaran Dasar

PT. Rejotumoto Kencono

Uraian	Akta tanggal 20 September 2008	Akta tanggal 22 Agustus. 2005
Nama dan Tempat Kedudukan	- Diuraikan dengan jelas alamat Perseroan (Pasal 5 ayat 2 UUPT)	- Tidak diurai kan
Jangka Waktu	- Tidak ditentukan	- Tidak ditentu kan
Saham	<ul style="list-style-type: none">- Uraian pemilik saham pada akhir akta/Pasal 20- Semua Modal Ditempat- kan harus disetor penuh (pasal 33 ayat 1)- Uraian mengenai saham dikurangi pasalnya, hanya 3 pasal.- Larangan “cross-holding” (mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau perseroan lain)	<ul style="list-style-type: none">- Uraian pemilik saham pada Pasal 4 akta.- Setor penuh juga- Ada 5 Pasal- Belum diatur
Direksi	<ul style="list-style-type: none">- Diurus seorang Direktur- Bertanggung-jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan- Hal-hal tertentu memerlu kan persetujuan dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none">- Diurus seorang Direktur- sama- Hal-hal tertent tu cukup dengan persetujuan se- orang Komisaris

	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Pasal 74) - Ada batas waktu jabatan Direktur (sesuai AD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada - Batas waktu ditetapkan 5 tahun
Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan dewan dan harus bertindak bersama-sama - Menetapkan peran Dewan Komisaris yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Boleh bertindak sendiri-sendiri - Boleh bertindak sendiri-sendiri
RUPS	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal setahun sekali - Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa - Dapat dilakukan melalui media elektronik (Pasal 77) - Panggilan diabaikan: semua pemegang saham hadir 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal enam bulan sekali - sama - Di wilayah Republik Indonesia - sama

Sumber: Akta Berita Acara Rapat PT. Rejotumoto Kencono.

Walaupun jumlah pasal dalam akta anggaran dasar menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 lebih sedikit jumlah pasalnya, yaitu hanya 20 pasal, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, anggaran dasarnya memuat 28 pasal, namun intinya atau isi dari suatu Anggaran Dasar telah terpenuhi, dengan menghilangkan atau

menggabungkan pasal-pasal yang dianggap tidak terlalu berpengaruh apabila tidak dicantumkan dalam akta anggaran dasar tersebut.

Menurut Pasal 157 ayat (4), Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai tanggal 16 Agustus 2008, maka Perseroan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun dalam UUPT tidak ditentukan, bahwa anggaran dasar yang terlambat disesuaikan tidak boleh menyesuaikan anggaran dasarnya lagi setelah lewat masa peralihan. Untuk itulah para notaris seluruh Indonesia berusaha keras akan pencabutan fakta integritas. Dan sampai saat ini, semua anggaran dasar Perseroan yang terlambat dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.

1.2. Konsekuensi Non Yuridis.

Konsekuensi Non Yuridis yang dimaksudkan disini adalah konsekuensi terhadap masyarakat umum. Jika di atas telah diuraikan bahwa secara yuridis, PT. Utama Jaya Mekar tersebut telah memenuhi atau telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang saat ini berlaku. Demikian juga telah berstatus badan hukum, dengan diterbitkannya Surat

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Lalu bagaimana konsekuensi non yuridis setelah perseroan tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya dengan perundang-undangan yang berlaku, dan memang diwajibkan untuk penyesuaian ?

Penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, secara non yuridis dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada publik tentang adanya Perseroan yang legal. Demikian juga dalam hal Direksi bertindak keluar atasnama Perseroan, sudah dapat diterima oleh instansi lain atau masyarakat umum, sehingga tidak ada hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan atau pengurusan surat-surat Perseroan.
- b. Dengan diperbaharui anggaran dasar perseroan dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri sebagai persetujuannya, maka pertanggungjawaban terbatas dari para pemegang saham perseroan tidak diragukan lagi. Artinya tidak ada lagi tanggung jawab renteng oleh para pendiri, pemegang saham, dan pengurus sebagaimana Perseroan Terbatas yang belum disahkan.
- c. Bagi Pemerintah dan Negara, terciptanya sistem ekonomi yang tertib, menunjang kemajuan investor asing sehingga

dapat menambah pemasukan kas negara melalui penerimaan pajak, dikarenakan dunia usaha yang tertib akan hukum yang berlaku terpenuhi.

- d. Terciptanya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi non yuridis tentunya memberikan rasa damai dan tenang bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama karena telah memenuhi kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian PT.Utama Jaya Mekar tersebut dapat diakui dalam masyarakat akan keberadaan atau eksistensinya, dan para pengurus dalam menjalankan jabatannya juga tanpa ragu-ragu lagi. Berarti Perseroan telah menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroannya. Demikian juga PT. Surya Sido Agung Mulya dan PT. Rejotumoto Kencono, sebagaimana diuraikan di atas. Ketiga perseroan tersebut merupakan contoh bagi perseroan yang lain.

2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas

Syarat-syarat dan perijinan suatu Perseroan terbatas agar dapat beroperasi, dimulai dengan adanya Akta Pendirian Perseroan terbatas tersebut, dengan pengecekan nama perseroan terbatas terlebih dahulu, karena antara Perseroan yang satu dengan yang lain, yang ada di Indonesia ini, tidak diijinkan jika ada nama yang sama atau hampir bersamaan, walaupun kedudukannya berbeda kota atau berbeda propinsi. Dan biasanya dilakukan pengecekan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Perdata, sebelum akta dibuat. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kemungkinan penolakan pengesahan di kemudian hari, hanya dikarenakan nama perseroan sudah dipakai orang/pihak lain. Jika sampai terjadi, maka sangat merugikan perseroan, misalnya saja telah dibuat cap atau kop surat atau papan nama, maka semuanya harus diganti. Pengecekan nama perseroan sekarang ini juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Pemakaian nama ini diatur dalam Pasal 16 UUPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998.

Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan perseroan, minimal didirikan oleh 2(dua) orang atau 2(dua) pihak. Dalam Jangka waktu paling lama 60(enampuluh) hari setelah ditandatangani akta pendirian

tersebut, harus diajukan permohonan pengesahan kepada menteri, hal mana lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) harus diajukan kepada menteri paling lambat 60(enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik
- (5) Dalam Jangka Waktu paling lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) telah dipenuhi secara lengkap. Paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dapat mengajukan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk

memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1).

- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Untuk operasional suatu Perseroan terbatas, maka syarat-syarat dan ijin-ijin yang harus dibutuhkan, selain Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan pendaftaran dalam Daftar Perseroan, dan Pengumuman dalam Berita Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Daftar Perseroan dimaksudkan agar pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi resmi tentang data suatu Perseroan, dan daftar ini terbuka untuk umum. Sedangkan pengumuman dalam Berita Negara dan dilanjutkan dengan Tambahan Berita Negara dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui akan adanya suatu Perseroan Terbatas yang telah resmi dan diakui oleh Pemerinath Republik Indonesia.

Mengenai pendaftaran perusahaan sebelum UUPT ini diundangkan, adalah menjadi kewajiban Direksi Perseroan untuk Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Yang didaftarkan dalam hal ini bukan perseroan

terbatasnya, melainkan surat-surat berupa akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Daftar Perusahaan merupakan pencatatan bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan pendaftaran ini diurus dimana Perseroan Terbatas tersebut berkedudukan. Sebagai contoh PT. Utama Jaya Mekar, berkedudukan di Kota Magelang, maka pendaftaran perusahaannya adalah di Pengadilan Negeri Kota Magelang, kemudian berkembang menjadi pendaftaran di Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Magelang, namun sekarang berubah lagi dan harus didaftar di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) setempat, dalam hal ini KPT Kota Magelang. Hal ini jelas memerlukan pengurusan yang memakan waktu yang sangat panjang. Dengan berlakunya UUPT ini semua pengurusan dipersingkat, guna menjangkau para investor dari luar, agar dapat mendirikan Perseroan di Indonesia dan beroperasi dengan waktu yang cukup singkat. Maka Pendaftaran Perseroan diambil alih menjadi tugas Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain izin-izin tersebut, dibutuhkan juga izin-izin lokal, dari pemerintahan daerah setempat, yaitu adanya kewajiban mendapatkan Domisili Kantor, Surat Izin Usaha Perdagangan,

Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha yang disetujui atau turut ditandatangani tetangga-tetangga di tempat kantor itu berdomisili. Jika dulu surat-surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari Pemerintahan Daerah setempat, maka sekarang semua ini diurus oleh Kantor Pelayanan Terpadu di tempat kedudukan perseroan, guna pelayanan satu atap, dan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka semua perseroan terbatas yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusannya langsung dicantumkan Nomor dan Tanggal Daftar Perseroan. Sehingga Daftar Perseroan bukan lagi menjadi tugas Direksi, melainkan tugas Menteri. Hal ini menyederhanakan prosedural yang berbelit-belit dan menjadikan pelayanan lebih cepat.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya,

Undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Semua perijinan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tentunya memiliki jangka waktu berlakunya, demikian juga dengan Anggaran Dasar Perseroan, biasanya setiap 5(lima) tahun sekali jangka waktu jabatan seorang anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris berakhir, maka perlu adanya pengangkatan kembali dengan membuat akta pernyataan keputusan rapat atau akta risalah rapat yang merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dalam mengangkat kembali susunan kepengurusan dalam suatu Perseroan. Surat Ijin lainnya juga dibutuhkan perpanjangan setelah jangka waktu berlakunya berakhir.

3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya.

Ada beberapa ketentuan peralihan Undang-Undang, yang memberikan jangka waktu penyesuaian yang berbeda-beda guna menyesuaikan anggaran dasar suatu Badan Hukum. Kita ambil saja contoh, UUPT Nomor 1 Tahun 1995 memberikan waktu penyesuaian 2(dua) tahun, UU Yayasan yaitu UU Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2005, memberi waktu 3(tiga) tahun untuk menyesuaikan seluruh

anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan tersebut, dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberi waktu 1(satu) tahun untuk wajib menyesuaikan anggaran dasar Perusahaan. Ada pendapat yang mengatakan Perseroan yang tidak/belum menyesuaikan anggaran dasarnya, kehilangan kewenangannya sebagai Badan Hukum, dan Perseroan tersebut menjadi bubar dan wajib diikuti dengan likuidasi, serta tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan permohonan penyesuaian anggaran dasarnya.

Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dapat mempunyai tanah dengan status Hak Guna Bangunan, asalkan saja badan hukum itu didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam prakteknya, banyak Perseroan Terbatas di Indonesia ini memiliki tanah dengan nama Perseroannya guna dijadikan sebagai pabrik atau kantor Perseroan. Hak Guna Bangunan ini biasanya diberikan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 20(duapuluh) tahun apabila jangka waktu berlakunya hak telah berakhir.

Secara empirik, banyak Perseroan yang memiliki aset cukup banyak, jika harus dilikuidasi bagaimana dampaknya terhadap aset atau harta kekayaan yang dimiliki. Perseroan

tersebut tidak diakui sebagai Badan Hukum, bagaimana keabsahannya terhadap kepemilikan aset-asetnya terutama hak atas tanahnya dan bagaimana keabsahannya terhadap kepemilikan harta kekayaan atau asset-assetnya, apakah legal atau illegal, jika harus kehilangan statusnya sebagai Badan Hukum.

Pengaturan terhadap bisnis di Indonesia pada dasarnya masih dalam tahap perkembangan, mengubah kebijakan secara mendadak menimbulkan *transaction cost* yang besar, sehingga tidak menunjang iklim investasi yang baik. Dunia usaha menghendaki adanya kepastian aturan atau kebijakan Pemerintah yang jelas, sehingga perubahan tidak berlaku mendadak, kecuali apabila keadaan menghendaki. Di Indonesia banyak Perseroan terbatas yang mempunyai asset tanah, dengan status Hak Guna Bangunan.

Dari penelitian di lapangan, yang penulis dapatkan adalah perseroan yang telah di non aktif, akan tetapi masih memiliki asset/kekayaan berupa beberapa bidang tanah dengan status hak yang hampir berakhir, atasnama Perseroan.

Bagaimana status harta kekayaan/asset perseroan tersebut, apabila anggaran dasar perseroan tersebut tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Apakah status badan hukum yang ada pada perseroan tersebut

masih dapat dipertahankan ataukah perseroan tersebut harus dibubarkan terlebih dahulu. Marilah kita lihat kasus dalam penelitian di Perseroan Terbatas PT. Surya Sido Agung Mulya berikut ini.

Kasus: Perseroan yang memiliki harta tak bergerak (tanah)

Perseroan Terbatas PT. Surya Sido Agung Mulya, adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Magelang, Jalan Raya Magelang – Purworejo, kilometer 11, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tempuran. Perseroan tersebut adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Industri Tekstil dan Perdagangan Umum, dengan kondisi non aktif atau berhenti proses. Hal ini tertuang dalam akta tanggal 11 April 2006, nomor 08, dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, Sarjana Hukum, Notaris di Magelang.

Adapun alasan penutupan, dikarenakan mesin-mesin produksi telah tua, hasil produksi kalah dalam persaingan pasar, tingginya biaya produksi, tidak adanya dana para pemegang saham untuk membeli atau memperbaharui mesin-mesin yang sudah tua, sehingga terhitung sejak tanggal 26 Desember 2005 perseroan dinyatakan non aktif. Dan akibat dari non aktif

tersebut, karyawan sudah diadakan Pemutusan Hubungan Kerja, Perpajakan juga sudah dihentikan, kantor dan pabrik juga sudah ditutup. Bahkan kekayaan/asset perseroan tersebut saat ini dalam proses penawaran akan dijual oleh Bank selaku krediturnya.

Pada hakekatnya, anggaran dasar perseroan tersebut tidak wajib lagi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena Perseroan dalam keadaan non-aktif dan sudah ditutup. Direksi Perseroan menemukan kendala dalam hal ini, dikarenakan perseroan tersebut memiliki asset/kekayaan berupa beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan. Satu bidang tanah diantara kekayaan/asset PT. Surya Sido Agung Mulya tersebut ada yang jatuh tempo atau berakhir pemberian hak guna bangunannya, yakni: Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sidoagung, yang tanggal berakhirnya hak jatuh pada tanggal 26 April 2008, maka pada saat pengajuan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang berwenang, salah satu syaratnya adalah wajib untuk melampirkan Anggaran Dasar PT. Surya Sido Agung Mulya yang telah disesuaikan dengan UUPT Nomor 40 tahun 2007.

Tentunya ini membuat para pengurus serba salah, jika disesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT maka akan memerlukan biaya dan harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham lagi, padahal diantara para pemegang saham sudah banyak yang berada di luar kota, bahkan luar negeri, sedangkan apabila tidak diperbaharui anggaran dasarnya, maka bagaimana status kekayaan/ assetnya yang berupa tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang terdiri dari beberapa bidang. Yang lebih penting, bagaimana konsekuensinya terhadap tanah-tanah yang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan akan berakhir atau bahkan telah berakhir?.

Demi keperluan tersebut, maka pihak perseroan harus menyesuaikan anggaran dasar perseroannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT, dan dibuatlah akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Surya Sido Agung Mulya, tertanggal 26 Juni 2008, nomor 21, dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, Sarjana Hukum, Notaris di Magelang, dan telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 Agustus

2008, Nomor AHU-52111.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Daftar Perseroan Nomor AHU-0072108.AH.01.09.Tahun 2008, Tanggal 19 Agustus 2008. Dan Surat Keputusan ini sebagai lampiran atau bukti sah nya status Badan Hukum PT. Surya Sidoaging Mulya tersebut dan sebagai lampiran juga untuk permohonan perpanjangan hak.

Setelah Anggaran Dasar diperbaharui, maka permohonan perpanjangan hak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga terbitlah Sertipikat hasil perpanjangan hak guna bangunannya, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 21/Sidoagung, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran, Desa Sidoagung, seluas 1.985 m² (seribu sembilanratus delapanpuluh lima meter persegi), menurut Surat Ukur tanggal 31 Desember 2007, Nomor 697/2007, dan lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang tanggal 13 Agustus 2008, tercatat atasnama PT. Surya Sido Agung Mulya, berkedudukan di Kabupaten Magelang.

Perpanjangan hak yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tersebut berlaku untuk jangka waktu 20(duapuluh) tahun lamanya, dan selanjutnya apabila ada sertipikat tanah hak guna bangunan lainnya yang berakhir masa berlakunya, maka pengajuan perpanjangan juga membutuhkan anggaran dasar Perseroan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena Perseroan sangat membutuhkan status atas tanah tersebut, hal ini dapat dikarenakan tanah tersebut masih menjadi jaminan di salah satu Bank Swasta, maka PT. Surya Sido Agung Mulia menyesuaikan anggaran dasar Perseroannya.

Ketaatan akan Undang-Undang dan etikat baik yang ditunjukkan perseroan tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, guna menjaga harta kekayaan/asset perseroan tetap sah adanya.

Bagaimana status kepemilikan tanah-tanah tersebut, apabila Perseroan tidak memperbaharui atau menyesuaikan anggaran dasarnya? Kesadaran hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia masih sangat minim, hal ini dikarenakan banyaknya Perusahaan yang dikelola oleh Keluarga yang berasal dari warisan dan dijalankan secara turun temurun.

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menekan serendah-rendahnya pengeluaran untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Para pelaku usaha pada umumnya mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kurang memperhatikan legitimasi atau status perseroannya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam kasus keterlambatan penyesuaian anggaran dasar di atas, kita melihat adanya unsur ketidak mengertinya atau kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang usaha yang dijalankan, hal ini dikarenakan Perusahaan tidak dikelola oleh profesional. Beruntung penerapan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, masih tidak terlalu kaku, penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas yang terlambat tidak mengalami hambatan yang berarti, dan dapat memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melegalkan status Badan Hukumnya. Dan dalam UUPT juga tidak ada pengaturan,

apabila Perseroan Terbatas terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diperbolehkan lagi menyesuaikan anggaran dasarnya. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

B.1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan

Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas

Konsekuensi perubahan UUPT yang membawa dampak perubahan anggaran dasar perseroan, apabila kita lihat perbandingan dari 3(tiga) akta Perseroan yang diuraikan dalam Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 di atas, maka dapat diambil kesimpulan perbedaan antara UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 5: Perbedaan Akta Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas Menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan

UUPT Nomor 1 Tahun 1995

Uraian	UU Nomor 40 Tahun 2007	UU Nomor 1 Tahun 1995
- Isi akta anggaran dasar	- Berisi 20 pasal - Batas yang tegas mengenai anggaran dasar dan bukan anggaran dasar PT	- Berisi 28 Pasal -Tidak ada batas yang tegas
- Alamat Perseroan	- Ada uraian yang jelas (Pasal 5 ayat (2) UUPT)	- Tidak dijelaskan

- Saham	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian pemilik saham pada akhir akta - Semua Modal Ditempatkan harus disetor penuh (pasal 33 ayat 1) - Modal Dasar minimal 50 juta - Uraian mengenai saham dikurangi pasalnya, hanya 3 pasal. - Larangan “cross-holding” (mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau perseroan lain) 	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian pemilik saham pada Pasal 4 akta. - Setor penuh juga - Tidak ditentukan - Ada 5 Pasal - Belum diatur
- RUPS	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi - Dapat dilakukan melalui media elektronik (Pasal 77) - Pengurangan pasal mengenai Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi - Di Wilayah Republik Indonesia - Diatur Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa
- Batas waktu permohonan pengesahan	<ul style="list-style-type: none"> - 60 hari untuk pendirian PT (Pasal 10 ayat 8) - 30 hari untuk perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditentukan

- Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Pasal 74) - Ada batas waktu jabatan Direktur (sesuai AD) - Taat asas prinsip kolegialitas (Pasal 95 ayat 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada - Batas waktu ditetapkan 5 tahun - Boleh bertindak sendiri-sendiri
- Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Taat asas “tanggung-renteng” (tidak boleh bertindak sendiri) - Menetapkan peran Dewan Komisaris yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Boleh bertindak sendiri-sendiri - Tidak ditentukan

Sumber: Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995

Pasal 175 ayat(3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya UUPT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, berarti sampai dengan batas waktu tanggal 16 Agustus 2008. Dalam kasus diatas perseroan PT. Utama Jaya Mekar tidak melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut, karena penyesuaian anggaran dasarnya baru dilaksanakan pada tanggal 20 September 2008. Keterlambatan Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Mekar tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya tidak ada sanksi yang dialami. Bahkan anggaran dasar

PT. Utama Jaya Mekar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Desember 2008 Nomor AHU-95078.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Perseroan yang telah menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu sebelum tanggal 16 Agustus 2008, maupun sesudah tanggal 16 Agustus 2008, tidak ada bedanya. Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya atau terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya juga tetap eksis. Dan sampai saat ini masih banyak Perseroan Terbatas di Indonesia yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, dapat mengajukan penyesuaian anggaran dasarnya melalui notaris. Inilah konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang merupakan peraturan yang mengatur tentang hukum perdata, sehingga sanksi yang diberikan juga bukanlah sanksi pidana.

Setelah batas waktu tanggal 16 Agustus 2008, Sisminbakum (pada saat itu) memang pernah diblokir dengan pengumuman dan diumumkan kepada semua notaris bahwa untuk sementara penyesuaian anggaran dasar ditutup, karena batas waktu telah berakhir. Semua Notaris mengalami kendala dalam mengakses internet yang berhubungan dengan

Sisminbakum guna penyesuaian anggaran dasar ini, namun Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tidak tinggal diam atas pemblokiran Sisminbakum. Demikian dijelaskan Tien Norman Lubis, SH, pada saat itu Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengenai pemblokiran Sisminbakum dan usaha Ikatan Notaris Indonesia,²⁹

Dalam perjalanannya, Undang-undang tersebut masih banyak kendala berkaitan dengan pemahaman dan penerapannya. Para pelaku usaha maupun kalangan notaris direpotkan oleh adanya penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 tersebut. Terutama setelah ditutupnya akses Sisminbakum, berkaitan dengan telah berakhirnya batas waktu penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk itu, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, menyampaikan bahwa tidak pernah terpikir apalagi mengusulkan wacana pemblokiran akses dan fakta integritas bagi Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian.

Wacana tersebut timbul pada saat rapat pembahasan perseroan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan UUPT. Pemblokiran tersebut dimulai pada tanggal 16 September 2008, karena anggpan Depkum & HAM,

²⁹.Ibid, halaman 11.

para pemilik badan hukum perseroan tidak taat asas. Dan yang akan menyesuaikan anggaran dasarnya diwajibkan untuk membuat fakta integritas, yang merupakan payung hukum atau pegangan Depkum & HAM . Dengan dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap publik ini tidak boleh tertunda atau mandek. Apalagi akta perseroan menyangkut ekonomi dan pembangunan. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menghadap Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta, alhasil akses telah dibuka kembali tanggal 27 Oktober 2008. Dan fakta integritas juga dicabut dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Acara up grading and refreshing course oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang berlangsung di Tangerang, dipenuhi dengan pertanyaan akan penutupan akses Sisminbakum sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut I Gede Purwaka, SH, notaris/PPAT Kota Tangerang, dalam UUPT tidak diatur Batas Waktu Penyesuaian, hanya dapat dibubarkan atas permintaan Kejaksaan atau yang berkepentingan. Tercatat dari 400 ribu badan hukum perseroan terbatas, hanya 10% (sepuluh persen) perseroan yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya

berdasarkan UUPT. Itu berarti Depkum & HAM mengambil langkah yang dirasa kurang perlu.³⁰

Jadi, apa yang dibuat oleh Depkum & HAM, belakangan ini memang dirasakan berlebihan dengan menutup sistem pengesahan Badan Hukum, sehingga para notaris tidak bisa mengakses atau memperoses pengesahan anggaran dasar tersebut. Penyesuaian itu tidak bisa dibatasi jangka waktunya. Tidak ada pasal UUPT yang menentukan batas waktu penyesuaian. Apakah Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan dianggap bubar atau mati ? Jawabnya tidak, Perseroannya jalan terus dan tidak bubar, serta masih boleh menyesuaikan anggaran dasarnya. Seperti halnya PT. Utama Jaya Mekar, berkedudukan di Kota Magelang tersebut. Memang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur, apabila waktu 1(satu) tahun yang diberikan itu telah berakhir, maka perseroan terbatas tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya lagi.

Menurut pendapat penulis Perseroan Terbatas yang belum disesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008, maka Perseroan Terbatas tersebut tetap eksis sebagai Badan Hukum dan tidak bubar dengan sendirinya, serta tidak kehilangan status sebagai Badan

³⁰. Ibid halaman 34

Hukum. Pasal 157 ayat (4) UUPT mengatakan Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Secara a contrario, ditafsirkan bahwa sepanjang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Perseroan tetap diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum.³¹

Bagaimana tanggung jawab hukumnya? Banyak yang berpendapat bahwa Perseroan yang belum/tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, tanggung jawab hukumnya ada pada organ perseroan secara tanggung renteng. Dalam hal ini disamakan dengan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, atau yang baru berdiri. Sehingga semua pemilik saham, pengurus, ataupun pendiri bertanggungjawab renteng apabila ada tindakan hukum yang dilaksanakan. Namun pendapat ini banyak disanggah oleh para notaris, dan seperti dikemukakan di atas, Pasal 157 ayat (4) UUPT mengatakan Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Secara

³¹ Pieter E.Latumeten, *Yayasan Lama antara Legal atau Illegal*, Berita Bulanan Notaris &PPAT, edisi Desember 2008, halaman 69

a contrario, ditafsirkan bahwa sepanjang belum dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Perseroan tetap diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum.³²

Jika keberadaannya sebagai Badan Hukum masih diakui, maka secara muntatis mutadis semua tanggung jawab hukum juga sama dengan Perseroan Terbatas yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya, bukan tanggung jawab renteng, namun tanggung jawabnya adalah terbatas sebesar modal yang telah dimasukkan dalam Perseroan. Berdasarkan data diatas, bahwa yang menyesuaikan anggaran dasar saat ini baru 10% (sepuluh persen), lalu bagaimana dengan yang 90% (sembilanpuluh persen) yang tidak/belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT ?.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya setelah batas waktu 16 Agustus 2008 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak ada kewenangan bagi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menolak memberikan persetujuan penyesuaian anggaran dasar Perseroan, asal saja penyesuaian tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya menurut UUPT.

³² I b i t

B.2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, dalam perkembangannya dinilai tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Maka perlu diadakan penyempurnaan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007, yang saat ini terkenal dengan sebutan UUPT. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam UUPT ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan anggaran dasar
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang

dilakukan melalui jasa teknologi informasi tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Permohonan pengesahan badan hukum perseroan merupakan wewenang pendiri, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Namun dalam praktek, karena pengajuan pengesahan secara elektronik melalui internet ini memerlukan User ID, yang diberikan kepada Notaris yang terdaftar pada Sisminbakum. Dan para pendiri juga tidak mau disibukkan dengan berbagai urusan tersebut, maka digunakan jasa notaris. Sebelum adanya akses melalui internet, pengajuan dilakukan secara manual, dan para notaris se Indonesia, harus mendatangi Departemen Kehakiman (pada waktu itu) untuk mengurus pengesahan Perseroan Terbatas, selain memakan waktu yang relatif lama, juga biaya untuk transportasi dan akomodasi, juga mengganggu jam kerja para staf atau karyawan yang ada di departemen.

Sebelum berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, setelah akta pendirian mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (pada waktu itu) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, direksi perseroan masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut. Kewajiban ini sebagaimana

diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Adapun sebagai penyelenggara pendaftaran perusahaan adalah Departemen Perdagangan (Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1982).

Setelah berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka kewajiban daftar perusahaan ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Direksi. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan oleh Menteri, demikian menurut Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan lagi. Namun dalam pelaksanaan kewajiban pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih diurus sendiri oleh Direksi Perseroan atau kuasanya, dalam hal ini biasa diurus oleh Notaris. Demikian juga pembayaran biaya cetak BNRI ini juga tersendiri, tidak dijadikan satu dengan pembayaran saat permohonan pengesahan akta-akta Perseroan.

Selain ijin-ijin tersebut, dibutuhkan juga ijin-ijin lokal, dari pemerintahan daerah setempat, yaitu adanya kewajiban mendapatkan Domisili Kantor, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha yang disetujui atau turut ditandatangani tetangga-tetangga di tempat kantor itu berdomisili. Jika dulu surat-surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari Pemerintahan Daerah setempat, maka sekarang kesemua ini diurus oleh Kantor Pelayanan Terpadu di tempat kedudukan perseroan, guna pelayanan satu atap. Juga Nomor Pokok Wajib Pajak atasnama Perseroan tersebut.

B.3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/ Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum atau subyek hukum artificial, yang diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan, dapat memiliki harta benda sebagai kekayaan perseroan, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Harta bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, yang dibeli dengan menggunakan nama perseroan. Kendaraan baik roda empat maupun roda dua, jika dibeli dengan uang perseroan

dan diatasnamakan perseroan tersebut, maka terbitlah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nama Perseroan. Demikian juga mesin-mesin untuk keperluan produksi dalam perseroan, dibeli oleh perseroan sebagai kekayaan perseroan maka faktur pembelian tersebut memakai nama perseroan. Terhadap kekayaan bergerak ini juga dapat dijadikan jaminan untuk suatu hutang, dengan nama Jaminan Fidusia atau Jaminan Kepercayaan, dimana yang dijaminakan hanya Surat Bukti Kepemilikan, namun barangnya tetap dapat dipakai oleh debitur untuk dioperasikan.

Harta tidak bergerak, seperti halnya tanah. Perseroan Terbatas dapat memiliki tanah sebagai harta kekayaan/asset perseroan, namun dibatasi hanya jenis hak tertentu yang boleh dimiliki oleh suatu perseroan. Perseroan terbatas hanya boleh memiliki Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Sewa, dan lain sebagainya, namun hanya badan hukum tertentu yang boleh memiliki Hak Milik. Hak milik adalah hak turutn-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³³

³³ Vide Pasal 20 *Undang-Undang Pokok Agraria*.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi:

(3) Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik

(4) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Pasal 21 ayat (2) tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu terbatas pada badan-badan hukum, yang untuk penunaian tugas dan usahanya yang tertentu benar-benar memerlukan tanah dengan hak milik, yaitu Bank-bank Negara, Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian, badan-badan keagamaan dan sosial. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang termasuk badan hukum, tidak diatur untuk memiliki Hak milik. Namun Perseroan Terbatas berhak memperoleh kepemilikan tanah dengan status Hak Guna Bangunan.

Perbedaan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan adalah, Hak Milik merupakan hak yang turun-temurun, sehingga si pemegang hak tidak perlu memperpanjang jangka waktu berlakunya hak untuk seterusnya. Lain halnya dengan Hak

Guna Bangunan, yang diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dua tahun sebelum berakhirnya hak, pemegang hak sudah harus mengajukan perpanjangan Hak guna Bangunan tersebut, Persamaannya adalah, baik Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan sama-sama dapat dijamin, dan semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinya jika tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka yang didahulukan adalah kepentingan umum.

Perlu diperhatikan bahwa selama Perseroan belum memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUP, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi Perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atasnama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selama Perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga Direktur belum boleh bertindak untuk dan atasnama perseroan dalam hal pembelian suatu asset/harta kekayaan, terutama untuk pembelian barang tidak bergerak seperti tanah.

Bagaimana jika suatu Perseroan Terbatas yang telah memiliki beberapa bidang tanah Hak Guna Bangunan sebagai harta kekayaan perseroan tersebut, setelah berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, tidak atau belum menyesuaikan anggaran dasarnya, apakah kepemilikan atas tanah tersebut masih diakui atau tetap eksis? Apa lagi jika kita hubungkan dengan Pasal Peralihan UUPT, yang memberikan sanksi yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) yaitu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Surya Sido Agung Mulya. perseroan ini sebenarnya sudah non aktif dan pabriknya sudah tidak memproduksi lagi, dalam arti tidak menghasilkan tekstil lagi. Namun PT. Surya Sido Agung Mulya ini tetap harus menjaga Perseroannya tetap eksis sebagai Badan Hukum, karena Perseroan tersebut memiliki beberapa bidang tanah sebagai harta kekayaan/asset perseroan. Perseroan ini hanya boleh memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Bangunan ini jangka waktu pemberian hak dibatasi antara 20(duapuluh) tahun sampai 30(tigapuluh) tahun. Sebelum jangka waktu hak ini berakhir maka harus diajukan perpanjangan kepada

instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang.

Pada saat perpanjangan hak guna bangunan atas tanah-tanah yang dimiliki PT.Surya Sido Agung Mulya sebagai harta kekayaan/asset Perusahaannya yang belum terjual, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya Akta Notaris yang memuat penyesuaian anggaran dasar dari Perseroan tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat pengajuan perpanjangan hak kepada instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah diundangkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dengan asumsi untuk dapat memiliki tanah atau harta tidak bergerak, suatu Perseroan Terbatas harus memiliki surat-surat resmi sebagai badan hukum, sehingga eksistensi atau keberadaan Perseroan Terbatas tersebut dapat tetap dipertahankan.

Bagaimana akibat hukumnya, apabila anggaran dasar PT. Surya Sido Agung Mulya ini tidak disesuaikan dengan UUPT? Apakah tanah-tanah yang dimilikinya akan menjadi gugur haknya? Lalu siapa yang berhak atas tanah-tanah tersebut? Pasal 157 ayat (4) UUPT, berbunyi: Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu 1(satu) tahun sejak diundangkan, dapat dibubarkan berdasarkan putusan

pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Di atas telah dikemukakan bahwa secara a contrario Pasal 157 ayat (4) ini diartikan, apabila belum dibubarkan maka status badan hukumnya masih tetap melekat, tidak hapus.

Oleh karena UUPT ini masih baru berlakunya, maka belum ada kasus mengenai dibubarkannya suatu perseroan terbatas sehubungan dengan penerapan Pasal 157 ayat (4), baik atas permintaan kejaksaan ataupun atas permintaan pihak ketiga. Apabila likuidasi atau pembubaran ini diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang memiliki harta berupa tanah, akan membawa dampak yang sangat riskan. Karena setelah dibubarkan status tanah tersebut tidak jelas? Dan tentunya pemilik tanah tersebut akan mempertahankan haknya. Hal ini kita kembalikan kepada pembuat undang-undang untuk memikirkan kembali pencantuman pasal peralihan tersebut. Bersyukurlah, sampai saat ini belum ada perusahaan yang dimohonkan pembatalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia karena wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkan UUPT. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT ternyata dapat berjalan lancar tanpa hambatan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap. Demikian juga prosedur permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pelayanannya semakin cepat, dengan menggunakan media elektronik. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan.

3. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah(barang tidak bergerak) harus tetap selalu mengikuti adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan undang-undang perseroan terbatas, agar Perseroan tersebut tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), walaupun Perseroan tersebut telah berhenti beraktifitas atau telah non aktif. Jangan sampai Pasal 157 ayat(4) tentang permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan oleh kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dilaksanakan.

C.2. Saran-Saran

Untuk itu disarankan kepada para praktisi hukum dan akademisi, bahwa:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Pengusaha untuk mengatakan belum mengetahuinya. Demikian juga Ketentuan Peralihan yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT supaya tidak diberlakukan secara kaku, karena dalam UUPT tidak diatur bahwa setelah lewatnya jangka waktu tersebut, Perseroan

Terbatas tidak diijinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

2. Oleh karena perkembangan politik hukum di bidang Perseroan Terbatas sangatlah cepat guna menunjang pelayanan yang cepat dalam dunia usaha, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut diusahakan diterapkan dengan sebaik-baiknya dan berlaku langgeng.
3. Perlunya penelitian terlebih dahulu oleh para ahli hukum sebelum adanya perubahan suatu Undang-Undang, agar undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, SH. *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, Tahun 1982
- Adie, Habib, *Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Ali, Chidir, dan Purbacaraka Parnadi, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 1978
- Amanat, Anistius, *Pembahasan UUPT 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*. Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Apeldorn.LL.Van, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandce Recht*, diterjemahkan Oetarid Sadino, dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 10 Pradya Paramita, Jakarta, 1968.
- Bratton, W.William, *Corporate Low*, the Internasional Library of Essays ini Law and Legal Theory, Second Series, Ashgate, Sydney, Australia, 1990
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel)* Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997
- Djohan Arief T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo, Jakarta, 2008
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Gautama, Sudargo, et.al., *Ikhisar Hukum Perseroan Berbagai Negara yang Penting bagi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Ginting, Janin, *Hukum Perseroan Terbatas* (UU nomor 1 tahun 1995), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 3, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Hidayat, Arief, *Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2006

<http://www.sisminbakum.com>

<http://www.sisminbakum.go.id>

<http://www.SABH.go.id>

<http://trbhukum.ekonomi.blogspot>, Hukum dan Komodifikasi Proses Peradilan, 22 Mei 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/philosophy_of_science

http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_Veil

<http://en.wikipedia.org/wiki/corporation>

<http://www.investorwords.com/1140/corporation.html>

<http://www.law-online.co.za/sbd/legalpersonality.htm>.

Inpres Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1998 tentang *Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan*

Kansil, CST. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

Kamal, Miko, *Undang-undang PT dan Harapan Implmentasi GCG*, <http://www.Legalitas.com>.

Kartika Sari, Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta. 2007

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Citra Umbara, Bandung, 2007.

Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Tim UII Press, Yogyakarta, 2005.

Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu, Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme*, Rakesarasin, 2001

Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta. 1974

Paramita P, *Hukum Persaingan Usaha*, Naskah disampaikan pada acara Retooling Program For Economic Law, Class Interaction, Semarang, 14 September 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 Tentang *Peraturan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang *Biaya Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang *Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang *Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang *Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikonpensasikan Sebagai Setoran Saham*

Pohan, A. Partomuan, *Beberapa perubahan yang perlu dicermati dalam UUPT*, Sosialisasi UUPT, Semarang, 5 September 2007.

-----, *“Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sesuai UUPT”*, Semarang, 5 September 2007.

- Priyono, Joko, *Bahan Kuliah Hukum Perdagangan International*, Undip, Semarang, 2008;
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1966.
- , *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981;
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- Purwosujtjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan 1983.
- Purwosujtjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan 1983
- Purwosujtjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Djambatan 1983
- Purwosujtjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 4, Djambatan 1983
- Purwosujtjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 5, Djambatan 1983
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Januari 2008.
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKIPPress, Jakarta, 2006.
- Rido, Ali, R, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf*, Alumni, Bandung, 2001;
- Salim, H S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Smith, Jan M., *System Mixing and in Transition: Import and Export of legal Models, the Dutch Experience*, <http://www.library.uu.nl/publarchief/fb/congres/01809180/15/b4.pdf>

- Subekti, R. , *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti,Bandung , 1989
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Inter Masa, Jakarta 1987
- , *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980;
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1977
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta, 1981
- Soemitro, Rochmat, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan* :PT.Eresco, Bandung, 1979
- Soemitro, Rochmat, *Aturan Bea Meterai*, PT. Eresco, Bandung, 1981
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 1982.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- , *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru* , Djambatan, Jakarta, 2008
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001;
- Tumbuan, Fred BG., *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggung Jawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta fihak-fihak Terkait Lainnya*, Seminar Dengar Pendapat Publik berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, 2001
- , *Konsep Pemisahan Menurut UUPT* (Pointer for Discussion), Sosialisasi UUPT oleh Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007

-----, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi UUPT, Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya Kawan Pustaka, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2006 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Perubahan UURI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang *Pokok-Pokok Koperasi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan*

Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan, 2000

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*, Djambatan, Bandung, 1982;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang
*Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, CV. Eko Jaya,
Jakarta, 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 Tentang
*Perubahan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang
Dokumen Perusahaan.

Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris &
Pemilik PT, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*,
Forum Sahabat, 2008.

Widjaja, IG, Ray, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi
Revisi, . Megapoint kesaint Blanc, Jakarta, 2002.

Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan, *Seri hukum Bisnis Perseroan
Terbatas*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996



**KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:
HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH
B4A 0007121

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

**KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI
PERSEROAN TERBATAS**

Disusun oleh:

HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH
B4A 0007121

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 Maret 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

<u>Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.</u>	<u>Prof Dr Paulus Hadisuprpto, SH., MH</u>
NIP. 130 368 053	NIP.130 531 702

KONSEKUENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAK

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia yang berusaha menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas, jika anggaran dasarnya tidak disesuaikan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisa masalah hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Titik tolak dari analisis adalah pembaharuan anggaran dasar Perseroan melalui akta-akta Risalah Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh seorang Notaris. Adapun materi yang akan dibahas mencakup sejarah perseroan di Indonesia, kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum, organ-organ badan hukum, konsekuensi perubahan Undang-Undang perseroan terbatas yang telah beberapa kali diubah terhadap eksistensi perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan dimuka dan dari hasil analisis penelitian dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perubahan UUPA, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya
2. Dengan berlakunya UUPA, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap.
3. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus menyesuaikan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah.
4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya. Dan apabila penerapan UUPA tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diharapkan pelayanan terhadap para pelaku usaha di Indonesia dalam dunia investasi menjadi lebih cepat.

Kata kunci adalah Perubahan UUPA, dan eksistensi Perseroan Terbatas.

RINGKASAN TESIS

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka Pemerintah merasa perlu untuk memperbaharui Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang sering disebut atau disingkat PT, dalam bahasa Belanda *Nederland Venootshap (NV)*.

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* – Staatsblad 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan inilah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang merupakan produk Pemerintah Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada

tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Perubahan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini, tentunya membawa dampak kepada para pelaku usaha di Indonesia, dimana setiap ada perubahan Undang-Undang, para pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroan terbatasnya, yang diberi waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya perundangan tersebut. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dimana dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 157 ayat 3, pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas yang baru diterbitkan dalam batas waktu tertentu, adapun bunyinya sebagai berikut:

“ Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang ini”

Sanksinya yang cukup berat bagi para pelaku usaha terdapat pada Pasal 157 ayat 4, yang berbunyi:

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

A.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konsekuensi perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap eksistensi Perseroan

Terbatas di Indonesia, sehubungan dengan adanya ketentuan peralihan yaitu: Pasal 157 ayat 4 UUPT tersebut ?

- 2. Syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat tetap diakui beroperasi di Indonesia ?
- 3. Bagaimanakah status harta kekayaan/asset yang diatasnamakan Perseroan Terbatas yang tidak/belum disesuaikan anggaran dasarnya?

Permasalahan yang diajukan diatas, diharapkan untuk dapat diketahui dan dijelaskan bagaimana pentingnya pengaturan suatu usaha dalam suatu undang-undang yang berlaku nasional dengan mendasarkan pada kepastian hukum yang membawa keseimbangan antara hak dan kewajiban antara para pelaku usaha.

A.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 4. Untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia.
- 5. Untuk mendalami dan menganalisa syarat-syarat dan perijinan operasional apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat tetap beroperasi di Indonesia.
- 6. Untuk mendalami dan menganalisa pentingnya penyesuaian anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan UUPT terhadap harta kekayaan/ asset Perseroan yang berupa barang tidak bergerak.

A.4. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya terdapat persamaan antara UUPT yang lama dan UUPT yang baru, meskipun ada penyempurnaan dan penambahan, sehingga terdapat beberapa perubahan yang perlu dicermati dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

6. Penyempurnaan asas dalam UUPT
7. Penyempurnaan Substansi aturan UUPT
8. Penambahan Substansi Aturan UUPT
9. Perubahan Substansi Aturan UUPT
10. Penambahan (dan pengurangan) Substansi Aturan UUPT

Kemudahan yang diberikan Pemerintah terhadap proses pemberian status Badan Hukum Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UUPT adalah: Penyederhanaan Prosedur, Penyederhanaan Isi Akta Anggaran Dasar Perseroan, Penyederhanaan Persyaratan.³⁴

E. Metode Penelitian

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (doktrinal) karena yang akan diteliti lebih jauh adalah konsekuensi berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007, pada Perseroan Terbatas yang mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum yang ada di Indonesia.

³⁴ Inovasi dan Kemudahan yang diberikan Pemerintah Terhadap Proses Pemberian Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Makalah Dirjen AHU, Departemen Hukum dan HAM, Sosialisasi Undang-undang Perseroan Terbatas, Semarang, September 2007.

7. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis, yaitu masalah hukum yang ada dikaji dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut.

8. Jenis Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan Tentang Persekutuan.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil karya dari para akademisi hukum, dan doktrin para ahli.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.

d. Dokumen-dokumen lain.

Dokumen-dokumen lain, yaitu bahan hukum diluar bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tertier, misalnya: contoh-contoh akta, sertipikat, dan lain-lain yang berhubungan dengan data tersebut.

9. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi perpustakaan dan studi dokumenter yang tersedia. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum. Studi dokumenter merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

10. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Kualitatif Normatif, dan data yang terkumpul dianalisa dengan mempergunakan "*content analysis*". *Content analysis* adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti faktual (deduksi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap karakter-karakter yang spesifik dari fakta di lapangan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas mengenai

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

B.1. Hasil Penelitian.

B.1.1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan

Terbatas.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), para pelaku usaha wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya UUPT, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, sehingga batas waktu penyesuaian anggaran dasar berakhir pada tanggal 16 Agustus 2008, untuk meneliti lebih lanjut ketaatan para pelaku usaha dalam mematuhi aturan ini, ataupun apa sanksinya jika terlambat menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan peraturan peralihan UUPT tersebut.

Kasus: Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasar.

Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Mekar, berkedudukan di Kota Magelang, Jalan Sunan Ampel nomor 56, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, yang bergerak di bidang Perdagangan bahan baku tekstil. Sampai batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang ditentukan yaitu tanggal 16 Agustus 2008, Perseroan terbatas PT. Utama Jaya Mekar ini belum menyesuaikan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT, dengan alasan belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru.

Direktur PT. Utama Jaya Mekar tersebut, bermaksud membuat Risalah Rapat dengan keluarnya salah seorang Direktur dengan mendatangi Kantor Notaris. Lalu Notaris menyarankan untuk sekaligus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, sehingga dibuatlah persiapan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan di Kantor Notaris,

pada tanggal 20 September 2008, dan dari hasil rapat tersebut kemudian dibuatkan akta Risalah Rapat secara Notariil.

Akta Risalah Rapat tersebut, kemudian dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pembuat Akta tersebut, dan dalam waktu yang tidak lebih dari 3(tiga) bulan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Desember 2008 Nomor AHU-95078.AH.01.02.Tahun2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0120105.AH.01.09,Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2008. Walaupun pada saat itu masih belum dicabut fakta integritas yang diwajibkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum belum dicabut, sehingga Direktur perseroan terbatas PT.Utama Jaya Mekar harus menandatangani fakta integritas. Dalam hal ini, Direktur perseroan berkomentar, wah seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja, pakai fakta integritas segala.

Secara Yuridis, pengurus PT. Utama Jaya Mekar tersebut telah memenuhi kewajibannya menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru. Jika kita amati secara seksama, perseroan tersebut baru berdiri tahun 2005 dan baru 3(tiga) tahun berdirinya yaitu sampai tahun 2008, pengurus perseroan sudah mengalami 2(dua) jenis Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 tahun 2007.

Konsekuensi Non Yuridis yang dimaksudkan disini adalah konsekuensi terhadap masyarakat umum, yaitu:

- e. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada publik tentang adanya Perseroan yang elegal. Demikian juga dalam hal Direksi bertindak keluar atasnama Perseroan, sudah dapat diterima oleh instansi lain atau masyarakat umum,

sehingga tidak ada hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan atau pengelolaan perseroan.

- f. Pertanggungjawaban terbatas dari para pemegang saham telah timbul. Juga pertanggungjawaban yang jelas dari suatu Perseroan atas segala perbuatan hukumnya yang menyangkut perjanjian dengan pihak ketiga.
- g. Terciptanya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B.1.2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas

Syarat-syarat dan perijinan suatu Perseroan terbatas agar dapat beroperasi, dimulai dengan adanya Akta Pendirian Perseroan terbatas tersebut, dengan pengecekan nama perseroan terbatas terlebih dahulu, karena antara Perseroan yang satu dengan yang lain, yang ada di Indonesia ini, tidak diijinkan jika ada nama yang sama atau hampir bersamaan, walaupun kedudukannya berbeda kota atau berbeda provinsi. Dan biasanya dilakukan pengecekan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Perdata, sebelum akta dibuat. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kemungkinan penolakan pengesahan di kemudian hari, hanya dikarenakan nama perseroan sudah dipakai orang/pihak lain. Jika sampai terjadi, maka sangat merugikan perseroan, misalnya saja telah dibuat cap atau kop surat atau papan nama, maka semuanya harus diganti.

Untuk operasional suatu Perseroan terbatas, maka syarat-syarat dan izin-izin yang harus dibutuhkan, selain Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan pendaftaran dalam Daftar Perseroan, dan Pengumuman dalam Berita Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri tersebut, maka pada saat itulah Status Badan Hukum suatu perseroan terbatas dinyatakan sah oleh Undang-Undang.

Selain ijin-ijin tersebut, dibutuhkan juga ijin-ijin lokal, dari pemerintahan daerah setempat, yaitu adanya kewajiban mendapatkan Domisili Kantor, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha yang disetujui atau turut ditandatangani tetangga-tetangga di tempat kantor itu berdomisili. Jika dulu surat-surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dari Pemerintahan Daerah setempat, maka sekarang kesemua ini diurus oleh Kantor Pelayanan Terpadu di tempat kedudukan perseroan, guna pelayanan satu atap. Juga Nomor Pokok Wajib Pajak atasnama Perseroan Tersebut.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka semua perseroan terbatas yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusannya langsung dicantumkan Nomor dan Tanggal Daftar Perseroan. Sehingga Daftar Perseroan bukan lagi menjadi tugas Direksi, melainkan tugas Menteri. Hal ini menyederhanakan prosedural yang berbelit-belit dan menjadikan pelayanan satu atap.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

B.1.3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya.

Bagaimana status harta kekayaan/asset perseroan tersebut, apabila anggaran dasar perseroan tersebut tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Apakah status badan hukum yang ada pada perseroan tersebut masih dapat dipertahankan. Marilah kita lihat kasus dalam penelitian di PT. Surya Sido Agung Mulia berikut ini.

Kasus: Perseroan yang memiliki harta tak bergerak (tanah)

Perseroan Terbatas PT. Surya Sido Agung Mulia, berkedudukan di Kabupaten Magelang, Jalan Raya Magelang – Purworejo, kilometer 11, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tempuran. Perseroan tersebut adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Industri Tekstil dan Perdagangan Umum, dengan kondisi non aktif atau berhenti proses.

Adapun alasan penutupan, dikarenakan hasil produksi kalah dalam persaingan pasar, tingginya biaya produksi, tidak adanya dana para pemegang saham untuk memperbaharui mesin-mesin yang sudah tua, sehingga terhitung sejak tanggal 26 Desember 2005 perseroan dinyatakan non aktif. Dan akibat dari non aktif tersebut, karyawan sudah diadakan Pemutusan Hubungan Kerja, Perpajakan juga sudah dihentikan, kantor dan pabrik juga sudah ditutup. Bahkan kekayaan/asset perseroan tersebut saat ini dalam proses penawaran akan dijual oleh Bank selaku krediturnya.

Pada hakekatnya, anggaran dasar perseroan tersebut tidak wajib lagi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena Perseroan dalam keadaan non-aktif dan

sudah ditutup. Direksi Perseroan menemukan kendala dalam hal ini, dikarenakan perseroan tersebut memiliki asset/kekayaan berupa beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan. Satu bidang tanah diantara kekayaan/asset PT. Surya Sido Agung Mulya tersebut ada yang jatuh tempo atau berakhir pemberian hak guna bangunannya, yakni: Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sidoagung, yang tanggal berakhirnya hak jatuh pada tanggal 26 April 2008, maka pada saat pengajuan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang berwenang, salah satu syaratnya adalah wajib untuk melampirkan Anggaran Dasar PT. Surya Sidoagung Mulya yang telah disesuaikan dengan UUPT Nomor 40 tahun 2007.

Demi keperluan tersebut, maka pihak perseroan harus menyesuaikan anggaran dasar perseroannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT, dan dibuatlah akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Surya Sido Agung Mulya, tertanggal 26 Juni 2008, nomor 21, dibuat dihadapan Hiasinta Yanti Susanti Tan, Sarjana Hukum, Notaris di Magelang, dan telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 Agustus 2008, Nomor AHU-52111.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Daftar Perseroan Nomor AHU-0072108.AH.01.09.Tahun 2008, Tanggal 19 Agustus 2008.

Setelah Anggaran Dasar diperbaharui, maka permohonan perpanjangan hak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga terbitlah Sertipikat hasil perpanjangan hak guna bangunannya, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 21/Sidoagung, untuk jangka waktu 20(duapuluh) tahun.

B.2. Pembahasan Hasil Penelitian

B.2.1. Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 175 ayat(3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya UUPT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, berarti sampai dengan batas waktu tanggal 16 Agustus 2008. Dalam kasus diatas perseroan PT. Utama Jaya Mekar tidak melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut, karena penyesuaian anggaran dasarnya baru dilaksanakan pada tanggal 20 September 2008. Keterlambatan Perseroan Terbatas PT. Utama Jaya Mekar tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya tidak ada sanksi yang dialami. Bahkan anggaran dasar PT. Utama Jaya Mekar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Desember 2008 Nomor AHU-95078.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Perseroan yang telah menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu sebelum tanggal 16 Agustus 2008, maupun sesudah tanggal 16 Agustus 2008, tidak ada bedanya. Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya atau terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya juga tetap eksis. Dan sampai saat ini masih banyak Perseroan Terbatas di Indonesia yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, dapat mengajukan penyesuaian anggaran dasarnya melalui notaris. Inilah konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang merupakan peraturan yang

mengatur tentang hukum perdata, sehingga sanksi yang diberikan juga bukanlah sanksi pidana.

Tidak ada pasal UUPT yang menentukan batas waktu penyesuaian. Apakah Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan dianggap bubar atau mati? Jawabnya tidak, Perseroannya jalan terus dan tidak bubar, serta masih boleh menyesuaikan anggaran dasarnya. Seperti halnya PT. Utama Jaya Mekar, berkedudukan di Kota Magelang tersebut. Memang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur, apabila waktu 1(satu) tahun yang diberikan itu telah berakhir, maka perseroan terbatas tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya lagi.

B.2.2. Syarat-Syarat dan Perijinan Perseroan Terbatas

Sebelum berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, setelah akta pendirian mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman (pada waktu itu), direksi perseroan masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Kewajiban ini sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Adapun sebagai penyelenggara pendaftaran perusahaan adalah Departemen Perdagangan (Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1982).

Setelah berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka kewajiban daftar perusahaan ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Direksi. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan lagi.

B.2.3. Status Harta Kekayaan/Asset Perseroan Yang Tidak/ Belum Menyesuaikan Anggaran Dasarnya.

Perseroan ini sebenarnya sudah non aktif dan pabriknya tidak memproduksi lagi, dalam arti tidak menghasilkan tekstil lagi. Namun PT. Surya Sido Agung Mulia ini tetap harus menjaga Perseroannya tetap eksis, karena Perseroan tersebut memiliki beberapa bidang tanah sebagai harta kekayaan/asset perseroan. Perseroan ini hanya boleh memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Bangunan ini jangka waktu pemberian hak dibatasi antara 20(duapuluh) tahun sampai 30(tigapuluh) tahun. Sebelum jangka waktu hak ini berakhir maka harus diajukan perpanjangan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan setempat.

Pada saat perpanjangan hak atas tanah-tanah atau sebagai harta kekayaan/asset Perusahaan yang belum terjual ini, yang kebetulan bertepatan telah diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, maka PT. Surya Sido Agung Mulia tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan UUPT, agar Perseroan terbatas tersebut dapat tetap diakui keberadaannya.

Seandainya anggaran dasar tidak disesuaikan, dan Pasal 157 ayat (4) terjadi pada Perseroan ini, yaitu dimintakan pembatalannya oleh pihak Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, maka bagaimana status tanah-tanah yang dimiliki ?. Bersyukurlah, sampai saat ini belum ada perusahaan

yang dimohonkan pembatalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) tersebut.

C. P E N U T U P

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

4. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia karena wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkan UUPT. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT ternyata dapat berjalan lancar tanpa hambatan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap. Demikian juga prosedur permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pelayanannya semakin cepat, dengan menggunakan media elektronik. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan.
6. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah(barang tidak bergerak) harus tetap selalu mengikuti adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan undang-undang perseroan terbatas, agar Perseroan tersebut tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), walaupun Perseroan tersebut telah berhenti beraktifitas atau

telah non aktif. Jangan sampai Pasal 157 ayat(4) tentang permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan oleh kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dilaksanakan.

C.2. Saran-Saran

Untuk itu disarankan kepada para praktisi hukum dan akademisi, bahwa:

4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Pengusaha untuk mengatakan belum mengetahuinya. Demikian juga Ketentuan Peralihan yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT supaya tidak diberlakukan secara kaku, karena dalam UUPT tidak diatur bahwa setelah lewatnya jangka waktu tersebut, Perseroan Terbatas tidak diijinkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.
5. Oleh karena perkembangan politik hukum di bidang Perseroan Terbatas sangatlah cepat guna menunjang pelayanan yang cepat dalam dunia usaha, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut diusahakan diterapkan dengan sebaik-baiknya dan berlaku langgeng.

6. Perlunya penelitian terlebih dahulu oleh para ahli hukum sebelum adanya perubahan suatu Undang-Undang, agar undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas.